

**BALAI POM
DI GORONTALO**



LAPORAN KINERJA INTERM

Triwulan II tahun 2025

**Balai Besar POM
di Gorontalo**



Balai POM di Gorontalo



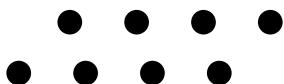
@bpom.gorontalo



@bpom_gto



0811-4355-155



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo ini bisa rampung dengan baik. Laporan ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas dan fungsi BBPOM di Gorontalo dalam menjaga masyarakat dari produk obat dan makanan yang belum memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaatnya. Di triwulan kedua tahun 2025 ini, BBPOM di Gorontalo terus berupaya keras untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan. Berbagai program penting sudah kami jalankan, mulai dari pengawasan produk secara rutin, pengambilan sampel dan pengujian, sampai dengan kegiatan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semua usaha ini sejalan dengan visi dan misi Badan POM untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Penyusunan laporan ini bukan cuma sekadar formalitas, tapi juga cerminan komitmen kami untuk bekerja berdasarkan data dan bukti yang akurat (pendekatan *evidence-based approach*) dalam pengawasan obat dan makanan. Setiap data dan pencapaian di laporan ini adalah hasil dari metode pengawasan yang terukur dan validasi yang teliti, sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dalam menjaga kesehatan publik. Secara khusus, capaian kinerja di periode ini meliputi peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, optimalisasi pengujian produk secara berkala, serta pendampingan yang lebih fokus kepada UMKM di Gorontalo. Selain itu, kami juga terus memperkuat kerja sama dengan dinas terkait dan pihak-pihak lain di daerah untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh.

Semoga laporan ini dapat digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi di Trwulan Ini dan periode selanjutnya, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segala

pihak yang telah berkontribusi dalam Penyusunan Laporan Kinerja Intern
Triwulan II Tahun 2025.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo, 21 Juli 2025
Plh Kepala Balai Besar POM
di Gorontalo,



Stepanus Simon Sesa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan tren yang membaik dibanding triwulan sebelumnya, ditandai dengan meningkatnya realisasi anggaran dan output kegiatan di berbagai bidang. Meskipun serapan anggaran hingga akhir Juni baru mencapai 27,44% dari total pagu Rp14.824.923.000, sejumlah indikator strategis seperti pengawasan pangan olahan, efektivitas laboratorium, dan edukasi publik berhasil mencapai target bahkan melampaui. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan program, meski masih diperlukan percepatan dan penyelarasan agar seluruh target tahunan dapat tercapai secara optimal pada semester berikutnya

Indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan capaian dari 91,3% di April, menjadi 94,9% di Mei, dan menurun sedikit menjadi 88,4% di Juni. Namun demikian, seluruh capaian tersebut tetap berada dalam kategori sangat baik, karena selalu melampaui 100% terhadap target triwulanan, bahkan mencapai 104,62% pada akhir Juni. Realisasi anggaran pada indikator ini berturut-turut naik dari Rp105.472.310 di April menjadi Rp178.541.653 di Juni.

Untuk indikator sampel pangan olahan berisiko, terjadi pertumbuhan positif dari capaian 83,3% di April menjadi 87,3% di Juni. Meskipun masih terdapat hambatan pada distribusi reagen pengujian, indikator ini tetap berhasil mencapai nilai 109,13%, menandakan pengendalian risiko pangan berlangsung efektif. Realisasi anggaran di indikator ini meningkat dari Rp18.502.386 pada April menjadi Rp31.320.510 di bulan Juni.

Pada indikator laboratorium, nilai pemenuhan laboratorium pengujian sesuai standar menunjukkan konsistensi capaian di angka 105,89% dari April hingga Juni. Anggaran yang direalisasikan meningkat dari Rp413.395.039 di April menjadi Rp699.787.777 di Juni, mencerminkan upaya perbaikan fasilitas dan dukungan teknis yang berjalan stabil.

Indikator efektivitas KIE untuk sediaan farmasi dan pangan juga menunjukkan kinerja positif. Tingkat capaian sebesar 91,79% di April tumbuh menjadi 91,02% di Juni, dengan nilai kumulatif 101,34%. Alokasi anggaran pada indikator ini mengalami kenaikan bertahap dari Rp38.676.087 pada April hingga Rp65.470.194 di akhir Juni, menunjukkan peningkatan jangkauan kampanye dan edukasi kepada masyarakat.

Untuk indikator sekolah dengan program pembudayaan keamanan pangan, terjadi lompatan capaian signifikan dari 25 sekolah di April menjadi 75 sekolah di Juni. Meskipun mengalami tantangan pada intensitas pendampingan lapangan akibat efisiensi anggaran, nilai capaian mencapai 125% terhadap target triwulan, dengan anggaran yang meningkat dari Rp68.657.293 menjadi Rp116.221.846.

Di sisi pendampingan UMKM, indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh rekomendasi CPPOB menunjukkan capaian progresif dari 38% di April menjadi 46,67% di Juni. Realisasi anggaran meningkat dari Rp5.482.060 menjadi Rp9.279.934. Namun karena sebaran belum merata dan adanya keterbatasan tenaga teknis, indikator ini belum dapat dikategorikan optimal.

Sementara itu, indikator keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan berada di posisi rendah, hanya 11,25% pada bulan Juni. Hal ini disebabkan oleh tidak ditemukannya kasus berat dalam periode evaluasi. Anggaran yang digunakan mencapai Rp130.410.246, namun efektivitas penggunaan anggaran ini masih harus dievaluasi ulang karena minimnya output penyidikan.

Pada indikator kelembagaan seperti nilai AKIP, Zona Integritas, dan Indeks Manajemen Risiko, belum terdapat capaian kuantitatif karena evaluasinya bersifat tahunan.

Pada aspek realisasi anggaran, hingga akhir bulan Juni 2025, realisasi kumulatif mencapai Rp4.068.356.127 atau sekitar 27,44% dari total pagu Rp14.824.923.000. Realisasi bulanan menunjukkan tren peningkatan: April sebesar Rp2.364.719.600, kemudian Mei Rp998.188.730, dan Juni mencapai Rp1.273.174.797. Walaupun mengalami peningkatan, pencapaian ini masih

menunjukkan adanya ketimpangan antara rencana dan pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja barang dan modal Hingga akhir Juni 2025, Balai Besar POM di Gorontalo telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp4.068.356.127** dari total **pagu** Rp14.628.300.000,00 atau setara dengan **27,81%**. Komposisi realisasi terdiri dari:

- **Belanja pegawai:** Rp2.062.150.414 (49,63%)
- **Belanja barang:** Rp1.962.605.713 (20,76%)
- **Belanja modal:** Rp43.600.000 (3,59%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
HIGHLIGHT KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	9
1.3 Struktur Organisasi.....	10
1.4 Isu Strategis.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis.....	20
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	24
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	27
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	31
2.5 Metode Pengukuran.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Error! Bookmark not defined.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya mekanisme perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara akuntabel dan berorientasi pada hasil. Melalui implementasi SAKIP, BBPOM di Gorontalo berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, terukur, dan berfokus pada pencapaian hasil nyata dalam pengawasan obat dan makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pencapaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan BBPOM di Gorontalo dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan adaptif untuk menghadapi tantangan di masa mendatang, sekaligus sebagai media komunikasi kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks globalisasi dan percepatan arus perdagangan bebas, pengawasan terhadap obat dan makanan di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sebagai provinsi yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Gorontalo mengalami peningkatan peredaran produk obat dan makanan, baik melalui jalur formal maupun informal. Kemajuan teknologi informasi dan perdagangan online turut

memperbesar potensi masuknya produk tanpa izin edar atau produk ilegal ke wilayah ini, sehingga menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan responsif.

Letak geografis Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, ditambah dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota, beberapa di antaranya sulit dijangkau, menambah tantangan dalam proses pengawasan. Keberadaan pelabuhan laut dan bandara sebagai pintu utama distribusi barang mengharuskan BBPOM di Gorontalo untuk meningkatkan intensitas pengawasan guna memastikan hanya produk yang memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan olahan dan obat tradisional di Gorontalo menunjukkan tren positif, namun di sisi lain menimbulkan kebutuhan untuk memberikan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif. Banyak pelaku usaha yang masih terbatas pemahamannya terhadap standar keamanan produk dan regulasi yang berlaku, sehingga memerlukan pengawasan sekaligus pembinaan berkelanjutan. Budaya konsumsi masyarakat yang khas juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengawasan.

Keberadaan BBPOM di Gorontalo menjadi sangat strategis dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, BBPOM di Gorontalo bertugas untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Peran ini semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman dan bermutu. Melalui pendekatan pengawasan penuh (full spectrum monitoring) mulai dari pra-pasar hingga pasca-pasar, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, BBPOM di Gorontalo berupaya membangun sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Seluruh upaya ini sejalan dengan visi BPOM untuk mewujudkan Indonesia yang semakin sehat melalui tersedianya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing. Dengan penyusunan Laporan Kinerja Intern Triwulan II Tahun 2025 ini, BBPOM di Gorontalo bertekad untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memperkuat kontribusinya dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan POM dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh Kepala UPT.

Selanjutnya dijabarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan BPOM di Gorontalo sebagai salah satu UPT BPOM dengan wilayah kerja meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing – masing sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka Investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjadikan Balai POM di Gorontalo

menjadi Balai Besar POM di Gorontalo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM (satuan kerja bersifat mandiri) yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Susunan organisasi BBPOM di Gorontalo terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
2. Kepala Bagian Tata Usaha, dan
3. Kelompok jabatan fungsional

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi BBPOM di Gorontalo didukung dengan bagan organisasi yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Organisasi BBPOM di Gorontalo

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua tim dan anggota tim.

1.4 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya BBPOM POM di Gorontalo harus mampu mengidentifikasi dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Beberapa Isu Strategis yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Gorontalo pada Tahun 2025, antara lain sebagai berikut

a. **Sistem Kesehatan Nasional (SKN)**

(ditambahkan dasar hukum per pres 72 tahun 2012) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang mengatur berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. SKN mencakup berbagai aspek seperti pelayanan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta pengawasan dan regulasi obat dan makanan. SKN berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan aksesibilitas agar semua warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan promosi kesehatan, penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kesehatan yang dikonsumsi masyarakat, serta kolaborasi antar sektor, termasuk keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan nasional.

BBPOM di Gorontalo merupakan UPT BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Peran BBPOM di Gorontalo sejalan dengan pilar SKN dalam aspek pengawasan dan regulasi, yang bertujuan melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. BBPOM di Gorontalo memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu melakukan pengawasan dan inspeksi produk dengan mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, dan alat kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu. Selain itu, BBPOM juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan melaksanakan sosialisasi tentang keamanan pangan dan obat serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang regulasi yang berlaku.

Sebagai bagian dari pengawasan, BBPOM di Gorontalo juga melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium guna mendeteksi kandungan berbahaya atau penyimpangan mutu pada produk yang beredar di masyarakat. Data ilmiah yang dihasilkan dari pengujian ini menjadi dasar bagi keputusan pengawasan lebih lanjut. Selain itu, BBPOM bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga lain dalam penegakan regulasi serta mendukung program nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan pengendalian bahan berbahaya. Tindakan hukum dan penegakan regulasi juga menjadi bagian dari tugas BBPOM dengan memberikan sanksi administratif serta merekomendasikan tindakan hukum terhadap pelanggaran seperti peredaran produk ilegal dan palsu.

Peran BBPOM di Gorontalo dalam SKN sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dari risiko konsumsi produk berbahaya. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan edukasi kepada masyarakat, diharapkan masyarakat semakin sadar dalam memilih produk yang aman dan bermutu, kasus peredaran produk ilegal dan berbahaya dapat ditekan, serta industri farmasi dan pangan semakin patuh terhadap standar yang ditetapkan pemerintah. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, BBPOM di Gorontalo terus berupaya memperkuat perannya dalam

memastikan keamanan obat dan makanan demi mendukung kesehatan masyarakat yang lebih baik.

b. **Peredaran Obat - Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan**

Peredaran obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat di Gorontalo. BBPOM di Gorontalo berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini dengan melakukan berbagai langkah strategis, seperti pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan peredaran obat, inspeksi berkala ke apotek, toko obat, serta fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, BBPOM di Gorontalo juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menindak tegas pelaku peredaran obat ilegal. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari upaya preventif BBPOM guna meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu sebagaimana diatur pada Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat – Obat Tertentu yang sering Disalahgunakan.

Beberapa jenis obat yang saat ini banyak ditangani oleh BBPOM di Gorontalo maupun kepolisian setempat adalah Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Dextromethorphan. Obat-obatan ini sering disalahgunakan oleh kalangan muda untuk efek euforia atau penenang, meskipun sebenarnya memiliki indikasi medis tertentu. Penyalahgunaan obat-obatan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan mental, kecanduan, hingga overdosis yang berpotensi fatal. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap distribusi dan penjualan obat-obatan ini menjadi prioritas utama bagi BBPOM dan kepolisian di Gorontalo.

Dampak penyalahgunaan obat-obatan terhadap generasi muda sangat mengkhawatirkan, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Penyalahgunaan obat dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan organ, gangguan sistem saraf, hingga ketergantungan yang sulit diatasi. Selain itu, dari sisi sosial dan pendidikan, generasi muda

yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat sering mengalami penurunan prestasi akademik, kehilangan motivasi belajar, serta terlibat dalam perilaku menyimpang yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Oleh karena itu, peran BBPOM di Gorontalo dalam mengawasi dan mencegah peredaran obat ilegal menjadi sangat penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman ini.

c. Peredaran Kosmetika dan Pangan Ilegal

Peredaran kosmetika dan pangan ilegal di Provinsi Gorontalo cukup memprihatinkan karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kosmetika ilegal, seperti *skin care*, krim pemutih, dan produk perawatan kulit lainnya, masih sering ditemukan di pasaran. Banyak diantara tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri atau hidroquinon, yang dapat merusak kulit dan menyebabkan gangguan kesehatan serius. Masyarakat yang tidak waspada sering kali terjebak membeli produk-produk tersebut dengan harapan mendapatkan hasil instan, namun tanpa menyadari risikonya.

Di samping itu, peredaran pangan ilegal juga masih menjadi masalah di Provinsi Gorontalo. Produk pangan ilegal ini sering kali beredar tanpa memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Produk ilegal dapat saja mengandung bahan kimia berbahaya sehingga berisiko mengancam kesehatan masyarakat. Produk Pangan ilegal yang banyak ditemukan saat ini terutama adalah minuman beralkohol lokal yang diperoleh dari olahan air nira yang dikenal dengan nama Cap tikus.

Peredaran kosmetika dan pangan ilegal ini diperburuk oleh meningkatnya tren penjualan obat dan makanan secara *online* dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih produk Obat dan Makanan Aman. Oleh karena BBPOM di Gorontalo juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan patroli siber / *profiling* serta sampling produk obat dan makanan yang diperjualbelikan secara *online* / *undercover buy* sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat

d. Isu Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online

Perubahan bisnis proses sertifikasi dari manual menjadi online melalui e- sertifikasi menuntut pegawai BBPOM di Gorontalo meningkatkan kompetensi sebagai pendamping pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi secara online. Perubahan sistem sertifikasi juga berdampak kepada pelaku usaha khususnya UMKM yang pada umumnya masih mempunyai literasi digital yang rendah. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar alur dan informasi sertifikasi bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan Baik sesuai dengan Proses Bisnis yang ada.

Perubahan bisnis proses sertifikasi obat dan makanan dari manual menjadi online membawa dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Pengajuan, verifikasi, dan persetujuan yang sebelumnya memerlukan interaksi fisik dan dokumen manual kini dapat dilakukan secara digital, yang mempercepat alur sertifikasi. Selain itu, sistem online juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pemantauan status permohonan secara *real-time*, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan atau birokrasi yang tidak perlu.

Digitalisasi ini juga berdampak pada pengurangan biaya operasional karena mengurangi penggunaan kertas dan biaya pengiriman dokumen, serta menghemat waktu yang biasanya digunakan untuk administrasi. Kemudahan akses bagi pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi keuntungan lain karena mereka bisa mengajukan sertifikasi tanpa harus datang ke kantor BBPOM di Gorontalo. Sistem online juga meningkatkan keamanan data dan memudahkan pengawasan terhadap kepatuhan regulasi yang berlaku, menciptakan proses yang lebih aman dan terstruktur. Secara keseluruhan, digitalisasi sertifikasi memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan efektivitas, mempercepat inovasi, dan mendukung ekosistem bisnis yang lebih kompetitif.

e. Simplifikasi dan Deregulasi Registrasi Pangan Olahan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Untuk Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah tidak diperlukan Sertifikat Standar atau Izin yang diverifikasi/disetujui oleh Kementerian/Lembaga. Di Badan POM, peraturan registrasi produk pangan mengalami simplifikasi dan deregulasi yakni pemeriksaan sarana dalam rangka pemenuhan CPPOB untuk UMKM difokuskan pada pelaksanaan higien sanitasi.

Selain itu, registrasi pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah melalui notifikasi dan tidak dipersyaratkan hasil analisa. Proses notifikasi tersebut meniadakan evaluasi label/penandaan saat proses registrasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha menggunakan label yang belum memenuhi peraturan.

Simplifikasi dan deregulasi registrasi pangan olahan memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi industri pangan dan mempercepat akses produk ke pasar. Dengan penyederhanaan proses registrasi, pelaku usaha, terutama UMKM, dapat lebih mudah mendapatkan izin edar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi produk pangan. Selain itu, deregulasi juga mengurangi beban administratif, memungkinkan pelaku usaha untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas dan keamanan produk. Di sisi lain, BBPOM di Gorontalo tetap memastikan bahwa standar keamanan pangan tetap terjaga melalui sistem pengawasan yang lebih berbasis risiko. Dengan demikian, konsumen tetap mendapatkan jaminan mutu dan keamanan produk yang beredar di pasaran.

f. Reformasi Birokrasi

Sebagai bagian dari komitmen penerapan Reformasi Birokrasi sesuai peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, BBPOM di Gorontalo melaksanakan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta peningkatan kompetensi SDM menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Selain itu,

upaya perbaikan dalam sistem perizinan dan pengawasan berbasis teknologi juga dilakukan guna memastikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

BBPOM di Gorontalo juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedur dilakukan untuk memastikan keberlanjutan reformasi yang adaptif dengan melibatkan berbagai unsur pentahelix pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi, BBPOM di Gorontalo melakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas ini diterapkan melalui berbagai aspek, seperti peningkatan integritas pegawai, pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar, serta mekanisme pengawasan internal yang ketat.

Melalui pembangunan Zona Integritas diharapkan kinerja BBPOM di Gorontalo semakin meningkat dalam memberikan layanan yang berkualitas, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Pembangunan Zona Integritas ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta bebas dari korupsi sehingga mampu menjadi lembaga yang semakin terpercaya dalam memastikan keamanan obat dan makanan bagi masyarakat.

g. Percepatan Penanganan *Stunting* di Provinsi Gorontalo

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia mereka dan berisiko tinggi menghadapi gangguan kesehatan jangka panjang, serta keterbatasan dalam pencapaian potensi intelektual dan produktivitas di masa depan.

Di Provinsi Gorontalo, stunting merupakan masalah serius yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk menangani masalah ini, berbagai pihak terlibat, termasuk BBPOM di Gorontalo. Peran BBPOM di Gorontalo dalam percepatan penanganan stunting di Gorontalo diantaranya adalah melalui pelaksanaan edukasi dan pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman, Germas SAPA. Melalui penerapan Keamanan Pangan baik di Desa, Sekolah maupun Pasar diharapkan peningkatan kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat, serta memastikan konsumsi pangan aman dan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil, bayi, dan anak-anak.

BBPOM di Gorontalo juga melaksanakan inovasi Layanan Sultan untuk Percepatan Penanganan Stunting (INGO A+) yaitu pendampingan pembuatan produk minyak kelapa kampung mengandung Vitamin A yang saat ini digunakan pada program penanganan stunting di Belle Mo'osehati (rumah sehat) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Pemerintah menetapkan penguatan sistem kesehatan nasional sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan penekanan pada peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat. Dalam kerangka ini, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu dilakukan penguatan menyeluruh untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat serta meningkatkan daya saing nasional di sektor kesehatan dan pangan. Tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin memperbesar kebutuhan terhadap pengawasan yang adaptif, efektif, dan berbasis risiko.

Sejalan dengan arahan RPJMN tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) sebagai lembaga yang memiliki mandat pengawasan Obat dan Makanan, menetapkan langkah strategis melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, serta mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagaimana disebutkan dalam RPJMN bahwa penguatan sistem pengawasan pangan, obat, dan alat kesehatan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa.

Renstra Badan POM Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh unit organisasi Eselon I, unit organisasi Eselon II, dan seluruh satuan kerja di lingkungan Badan POM dalam penyusunan rencana strategis sektoral dan dokumen perencanaan

tahunan. Dokumen ini menegaskan arah kebijakan Badan POM untuk memperkuat sistem pengawasan pra-pasar dan pasca-pasar, mendorong inovasi dan harmonisasi regulasi, memperluas jangkauan pengawasan berbasis teknologi informasi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Dengan penyusunan Renstra ini, Badan POM RI berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata dalam mencapai sasaran pembangunan nasional bidang kesehatan dan pangan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta memperkuat ekosistem perdagangan yang aman, adil, dan berdaya saing di era globalisasi. Berdasarkan Renstra BPOM tersebut, BBPOM telah merancang Rencana Strategis BBPOM di Gorontalo 2025-2029 yang saat ini masih dalam proses review di Biro Perencanaan Badan POM.

A. Visi BPOM

Obat dan Makanan Aman, Bermutu, Dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

B. Misi BPOM

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

C. Tujuan BPOM

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis BBPOM di Gorontalo 2025

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5
		1.2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		1.3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		1.5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		1.7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		1.9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		1.11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1
SK2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		3.2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7

NO	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
		3.3	Jumlah desa pangan aman	3
		3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
SK6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
SK7	Layanan Publik UPT yang Prima	7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
		7.2	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97
SK8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	8.1	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		8.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		8.3	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BBPOM Di Gorontalo 2025-2029 . Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor

53 Tahun 2014, yang menjadi landasan dalam perencanaan kinerja instansi pemerintah.

RKT disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi unit organisasi dan unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (tahun n+1).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk memastikan pengawasan obat dan makanan yang efektif di Provinsi Gorontalo. RKT merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran.

RKT BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai POM di Gorontalo Nomor: NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025 tanggal 20 September 2024. Dokumen RKT BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 memuat 8 sasaran kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja dengan target dan alokasi anggaran sebagai berikut:

Indikator Kinerja BBPOM di Gorontalo :

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	Rp650.662.000,00
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	Rp38.650.000,00
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Rp114.141.800,00
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	Rp7.189.000,00
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Rp988.500,00

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	Rp166.961.800,00
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Rp114.141.800,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Rp114.141.800,00
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	Rp57.070.900,00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	Rp28.535.450,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	Rp20.357.950,00
SK2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5	Rp2.550.247.000,00
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	Rp238.594.000,00
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7	Rp423.549.000,00
		Jumlah desa pangan aman	3	Rp446.279.000,00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Rp521.778.000,00
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos	91	Rp33.819.000,00

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Anggaran
	standar keamanan dan mutu	yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan		
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	Rp475.256.000,00
SK6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	Rp116.038.000,00
SK7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	Rp62.387.000,00
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	Rp684.500.000,00
SK8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1	Rp360.500.000,00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Rp7.220.512.000,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	Rp80.000.000,00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo tahun 2025 merupakan komitmen formal antara Kepala BBPOM di Gorontalo dan Kepala BPOM dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo tahun 2025 terdiri dari 8 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Terdapat penambahan 3 indikator direktif penugasan dari masing – masing unit pengampu.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tata cara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Perjanjian Kinerja disusun oleh BBPOM di Gorontalo dengan tujuan, antara lain: i. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; ii. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; iii. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi; iv. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; v. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2 PK periode Bulan Januari – Desember 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1
2.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025
8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	80,1
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Dalam rangka mewujudkan target kinerja pada Tahun 2025, BBPOM di Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp14.628.300.000 sesuai DIPA SP DIPA-063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Gorontalo tahun 2025 merupakan panduan operasional yang dirancang untuk mencapai 8 sasaran strategis melalui 24 indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. RAPK memuat: i. Indikator kinerja; ii. Target kinerja B1-B12; dan iii. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk masing – masing indikator disertai aktivitas yang mendukung pencapaian indikator; iv. Tanda tangan pihak pemilik kinerja (Kepala BPOM/Kepala BBPOM di Gorontalo). Dokumen ini menguraikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh BBPOM di Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja disertai target kinerja per triwulan dari masing-masing indikator. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Gorontalo dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi *e-performance*.

RAPK BBPOM di Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	Rp650.662.000,00
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	Rp38.650.000,00
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Rp7.189.000,00
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp988.500,00
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	-	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	93,01	Rp166.961.800,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	ditindaklanjuti oleh stakeholder													
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp114.141.800,00
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	Rp114.141.800,00
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	Rp57.070.900,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	Rp28.535.450,00
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	Rp20.357.950,00
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar			64,5	64,5	64,5	64,7	64,7	64,7	64,9	64,9	64,9	65,1	Rp2.550.247.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	Kemampuan Laboratorium													
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	89,82	Rp238.594.000,00
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	Rp423.549.000,00
15	Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	Rp446.279.000,00
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	Rp521.778.000,00
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	Rp33.819.000,00
18	Persentase Keberhasilan	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	Rp475.256.000,00

No	Indikator Kinerja	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT													
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	Rp116.038.000,00
20	Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	Rp62.387.000,00
21	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91,97	Rp684.500.000,00
22	Nilai AKIP UPT BPOM												80,1	Rp360.500.000,00
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	Rp7.220.512.000,00
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	Rp80.000.000,00

2.5 Metode Pengukuran

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator berdasarkan mekanisme pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian terjadi perubahan pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Unit berdasarkan Surat Edaran No: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 sehingga BBPOM di Gorontalo melakukan penyesuaian untuk penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:

- a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
- b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
- c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
- d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja
- e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
- f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
- g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
- h. Dukungan sistem informasi

2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan

(2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan Normalisasi

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

3. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib.
- Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new.

Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

- (1) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
- (2) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
- (3) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

e) Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik. NKO Periodik merupakan ilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						$= (518,41\% / 5)$ $= 103,68\%$
Predikat NKO (6)						Istimewa

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>110\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai.

Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan Balanced Score Card. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kategori	Notif
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	88,4	104,62	Sangat Baik	
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-		
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,3	109,13	Sangat Baik	
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	-	100	100,00	Baik	
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	93,6	117,00	Tidak dapat disimpulkan	
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	94,12	101,19	Sangat Baik	
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Tidak dapat disimpulkan	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	96,97	121,21	Tidak dapat disimpulkan	
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	96,98	103,17	Sangat Baik	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	98,21	130,95	Tidak dapat disimpulkan	
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	97,97	111,2	Tidak dapat disimpulkan	
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	64,7	68,1	105,3	Sangat Baik	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kategori	Notif
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,02	101,34	Sangat Baik	
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	60	75	125,00	Tidak dapat disimpulkan	
15	Jumlah desa pangan aman	70	55	78,57	Cukup	
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00	Baik	
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10	46,67	186,68	Tidak dapat disimpulkan	
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	11,25	28,13	Kurang	
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00	Baik	
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
21	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kategori	Notif
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Realisasi Akhir Tahun	

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	84,5	98,7	104,62	Dikecualikan	104,62
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Juni	26	-	-	-	-
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80	98,3	109,13	kecualikan	109,13
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	Juni	100	-	100,00	Dikecualikan	100,00
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80	78,2	117,00	Normalisasi	110,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	93,01	100	101,19	Dikecualikan	101,19
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	90	0	111,11	di normalkan	110
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	80	-	121,21	di normalkan	110

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	94	-	103,17	Dikecualikan	103,17
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	75	94,16	130,95	Normalisasi	110
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	88,1	99,75	111,2	Normalisasi	110
2.	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Juni	64,5	68,3	104,93	Dikecualikan	104,93
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Juni	89,82	91,02	101,34	Dikecualikan	101,34
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	60	75	125,00	dinormalkan	110
		Jumlah desa pangan aman	Juni	70	55	78,57	Dikecualikan	78,57
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Juni	70	70	100,00	Dikecualikan	100,00

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Juni	10	10,67	186,68	dinormalkan	110
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Juni	15	0	28,13	Dikecualikan	28,13
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	Juni	50	50	100,00	Dikecualikan	100
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Juni	4,7	-	-		
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Juni	91,97	-	-		
8.		Nilai AKIP UPT BPOM	Juni	80,1	-	-		

Tabel NKO Periodik Triwulan II Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bulan	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Juni	5	-	-		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Juni	3	-	-		
Total Capaian PK								`1801,07%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)								100,06%
Predikat NKO								Istimewah

Pada bulan Juni 2025, kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh UPT menunjukkan pencapaian yang cukup baik di sebagian besar indikator. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai realisasi 88,4 persen dari target 84,5 persen, menghasilkan capaian 104,62 persen. Sementara itu, untuk persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti, realisasinya mencapai 87,3 persen dari target 80 persen, atau 109,13 persen capaian. Indikator terkait persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar juga mencapai target secara penuh, yakni 100 persen.

Pada pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga (PIRT), capaian indikator menunjukkan realisasi sebesar 93,6 persen dari target 80 persen, atau setara dengan 117 persen yang kemudian dinormalisasi menjadi 110 persen. Persentase keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder menunjukkan capaian sebesar 101,19 persen dengan realisasi 94,12 persen dari target 93,01 persen. Pengawasan terhadap sarana produksi juga menunjukkan hasil memuaskan, di mana sarana produksi sediaan farmasi diperiksa dan ditindaklanjuti sebesar 100 persen dari target 90 persen, dengan capaian 111,11 persen yang dinormalisasi menjadi 110 persen. Demikian pula, untuk sarana produksi pangan olahan, capaian mencapai 121,21 persen yang dinormalisasi juga menjadi 110 persen.

Pengawasan terhadap fasilitas distribusi menunjukkan capaian cukup tinggi, seperti pada distribusi sediaan farmasi dengan capaian 103,17 persen, dan distribusi pangan olahan dengan capaian 130,95 persen yang kemudian dinormalisasi menjadi 110 persen. Indikator pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan mencapai realisasi 97,97 persen dari target 88,1 persen, atau setara dengan capaian 111,2 persen dan dinormalisasi menjadi 110 persen. Sementara pada aspek penguatan laboratorium, nilai pemenuhan laboratorium pengujian sesuai standar menunjukkan capaian 104,93 persen dari realisasi 68,1 persen terhadap target 64,9 persen.

Dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), tingkat efektivitas KIE mencapai realisasi 91,02 persen dari target 89,82 persen atau capaian 101,34 persen. Indikator jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan

pangan menunjukkan realisasi 75 sekolah dari target 60 sekolah, dengan capaian 125 persen yang dinormalisasi menjadi 110 persen. Untuk indikator jumlah desa pangan aman, realisasi hanya mencapai 55 dari target 70 desa atau capaian 78,57 persen. Adapun jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berhasil mencapai target secara penuh dengan capaian 100 persen.

Pendampingan terhadap UMKM menunjukkan hasil sangat tinggi, dengan capaian sebesar 186,68 persen dari realisasi 46,67 persen terhadap target 25 persen, yang dinormalisasi menjadi 110 persen. Sebaliknya, pada indikator penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, capaian sangat rendah yaitu hanya 28,13 persen dari realisasi 11,25 persen terhadap target 40 persen. Namun, untuk pelaporan analisis kejahatan di bidang tersebut, realisasi tercapai 100 persen sesuai target. Secara keseluruhan, total capaian indikator Perjanjian Kinerja (PK) pada bulan Juni 2025 mencapai 1801,07 persen dengan rata-rata capaian sebesar 100,06 persen. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh oleh UPT adalah sebesar 100,06 dengan predikat “Istimewa”. Capaian ini mencerminkan keberhasilan UPT dalam mengelola dan melaksanakan berbagai program pengawasan serta pembinaan secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	88,4	104,62	Sangat Baik 

Target kinerja yang telah ditetapkan untuk periode ini sebesar **84,5%**, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai menunjukkan angka sebesar **88,4%**. Dengan capaian tersebut, tingkat pencapaian kinerja berada pada angka **104,62%**, yang berarti realisasi kinerja telah melampaui target yang direncanakan. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian ini dikategorikan dalam klasifikasi "**Sangat Baik**".

Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap sediaan farmasi berisiko, serta menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap temuan telah dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan di triwulan berjalan telah berjalan secara efisien dan tepat sasaran.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,7	88,4	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya

Berdasarkan data, realisasi kinerja pada **Triwulan I** mencapai **98,7%**, sementara pada **Triwulan II** tercatat sebesar **88,4%**. Dengan demikian, terjadi penurunan capaian sebesar **10,3 poin persentase** pada Triwulan II jika dibandingkan dengan Triwulan I. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko mengalami penurunan efektivitas pada periode Triwulan II.

Meskipun capaian Triwulan II masih tergolong tinggi, evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab penurunan kinerja perlu dilakukan guna memastikan konsistensi mutu pengawasan serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	88,4	104,62	Tercapai 

Target tahunan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar **84,5%**. Sementara itu, realisasi kinerja pada triwulan berjalan mencapai **88,4%**. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi mencapai **104,62%** dari target tahunan, yang berarti bahwa kinerja pengawasan pada triwulan ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk satu tahun penuh. Berdasarkan kategori pencapaian, hasil ini termasuk dalam klasifikasi “**Tercapai**”.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada triwulan berikutnya guna menjaga konsistensi mutu dan integritas pengawasan

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan II tahun 2025, kinerja pengawasan terhadap *sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* menunjukkan penurunan dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat sejumlah faktor penyebab yang berkontribusi terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja tersebut.

Salah satu faktor utama adalah **penyesuaian anggaran** sebagai dampak dari kebijakan efisiensi nasional. Kebijakan ini berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian, di mana terjadi penurunan target output sebesar 25% dari rencana awal. Selain itu, **rencana pelaksanaan kegiatan menjadi tidak**

konsisten akibat perubahan kebijakan dan keterbatasan responsivitas laboratorium terhadap kebutuhan pengujian.

Kinerja juga dipengaruhi oleh **keterbatasan sumber daya manusia (SDM)**, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas teknis dalam menghadapi volume pekerjaan yang fluktuatif. Sementara itu, **dukungan alat dan bahan pengujian**, seperti reagen, juga mengalami kendala distribusi dan ketersediaan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses tindak lanjut pengawasan. Hal ini turut menghambat proses penghitungan indikator dan pelaporan hasil yang semestinya dilakukan secara tepat waktu.

Lebih lanjut, **kebijakan relaksasi anggaran** yang dikeluarkan pada periode ini menyebabkan kegiatan yang telah direncanakan harus disesuaikan kembali, mengganggu konsistensi pelaksanaan dan akurasi perhitungan indikator kinerja.

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada Triwulan II Tahun 2025, pencapaian kinerja BBPOM di Gorontalo dalam hal tindak lanjut terhadap *sampel sediaan farmasi berisiko* menunjukkan **penurunan capaian** dibandingkan Triwulan I, meskipun capaian terhadap target tahunan tetap tergolong dalam kategori “Tercapai” dengan nilai capaian sebesar 104,62%.

Penurunan capaian tersebut perlu dilihat dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung sepanjang periode triwulan kedua. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa program dan kegiatan berkontribusi terhadap **kegagalan mencapai konsistensi kinerja**, di antaranya:

1. **Kegiatan Pengambilan Sampel dan Pengujian Laboratorium**

Pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian mengalami hambatan akibat adanya penyesuaian anggaran yang bersifat efisiensi nasional. Kondisi ini menyebabkan perubahan target output hingga 25% dari rencana awal serta berdampak pada keterlambatan dan penurunan volume kegiatan pengawasan.

2. **Program Pengendalian Mutu Internal**

Kegiatan pengujian laboratorium juga terdampak oleh keterbatasan ketersediaan reagen dan alat, serta kemampuan laboratorium dalam menyesuaikan diri

terhadap kebijakan teknis yang berubah-ubah. Hal ini mengakibatkan keterlambatan proses pengujian, sehingga memengaruhi kecepatan tindak lanjut dan pencatatan indikator kinerja.

3. **Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Internal**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala belum sepenuhnya optimal dalam mendeteksi kendala operasional secara real time. Keterbatasan personel dalam unit pengawasan serta beban kerja yang tinggi turut memengaruhi efektivitas evaluasi terhadap pencapaian kinerja.

4. **Dampak Kebijakan Relaksasi Anggaran**

Pada periode ini, kebijakan relaksasi anggaran juga diterapkan yang menyebabkan beberapa kegiatan strategis mengalami penjadwalan ulang atau pengurangan frekuensi. Akibatnya, penyusunan dan perhitungan indikator kinerja yang telah ditetapkan mengalami ketidaksesuaian dengan rencana awal.

Meskipun demikian, capaian kinerja secara umum masih tergolong **positif**, berkat komitmen pelaksanaan kegiatan utama yang tetap berjalan, termasuk kegiatan pengujian prioritas serta koordinasi intensif dengan pusat dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan.

Rekomendasi:

- Perlu dilakukan penguatan pada kegiatan perencanaan teknis agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan anggaran.
- Diperlukan percepatan proses pengadaan alat dan bahan uji, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menjamin kelancaran pengujian.
- Perlu optimalisasi sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan, terutama pada pelaksanaan sampling, pengujian, dan tindak lanjut lapangan.
- Penguatan koordinasi lintas unit dan peningkatan efisiensi penugasan SDM menjadi krusial dalam menjamin kesinambungan program dan kegiatan prioritas.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, diharapkan pelaksanaan program pada triwulan berikutnya dapat lebih terarah, efisien, dan adaptif terhadap tantangan yang ada, sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan secara berkelanjutan

6. Upaya peningkatan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja indikator ini, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain

1. **Perencanaan Adaptif Berbasis Risiko**

Perlu dilakukan penyesuaian rencana kerja berdasarkan analisis risiko yang terukur, dengan tetap mempertimbangkan realitas kapasitas SDM dan alat yang tersedia. Perencanaan ini harus fleksibel terhadap perubahan kebijakan fiskal.

2. **Peningkatan Kapasitas SDM**

Penguatan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan, pendampingan, dan distribusi SDM yang merata sangat dibutuhkan untuk menjaga mutu pengawasan, terutama di area yang padat aktivitas pengujian.

3. **Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengujian**

Penyediaan alat uji yang memadai serta jaminan ketersediaan bahan habis pakai (seperti reagen) perlu diupayakan secara berkelanjutan agar tidak terjadi hambatan teknis dalam proses pengujian laboratorium.

4. **Koordinasi dan Konsistensi Kebijakan**

Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pusat dan daerah terkait kebijakan pelaksanaan program dan anggaran. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyesuaian mendadak yang berdampak pada pelaksanaan teknis di lapangan.

5. **Evaluasi Berkala dan Sistem Monitoring Kinerja**

Sistem pemantauan capaian kinerja perlu dioptimalkan secara periodik agar kendala dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan korektif dapat segera dilakukan.

2. **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO**

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-----------------	--------------------	-----------	----------

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-
--	----	---	---	---

Indikator kinerja ini merupakan perhitungan persentase dari fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Pada triwulan ini, sesuai rencana pelaksanaan kegiatan Farmakovigilans telah dilakukan KIE farmakovigilans kepada penanggungjawab dari 45 sarana pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Gorontalo. Sarana tersebut antara lain, Puskesmas, Rumah sakit dan Klinik yang sebelumnya belum pernah mendapatkan KIE atau intervensi atau advokasi pelaksanaan pelaporan KTD/ESO. Pada triwulan ini belum terdapat sarana yang melakukan pelaporan sehingga indikator kinerja ini belum dapat dihitung.

- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Laporan kinerja interim triwulan 1 merupakan awal pengukuran kinerja pada tahun berjalan sehingga belum terdapat data pembandingan realisasi kinerja dari triwulan sebelumnya. Selain itu, indikator kinerja ini adalah indikator kinerja baru yang disesuaikan dengan rencana strategis 2025-2029 sehingga belum terdapat juga riwayat realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.

- c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-
--	----	---	---	---

Sesuai penjelasan di atas, pada triwulan ini realisasi kegiatan baru sampai pada tahapan melakukan KIE Farmakovigilans terhadap 45 sarana dan belum ada sarana yang melaporkan KTD/ESO ke Badan POM sehingga realisasi indikator pada triwulan ini belum dapat dihitung dan juga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Dalam upaya pemenuhan capaian persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025, BBPOM di Gorontalo telah melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans bagi petugas farmakovigilans. KIE diikuti oleh 45 orang peserta yang merupakan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Selain dengan melakukan KIE, persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO dapat dicapai sesuai target dengan melakukan upaya-upaya berikut :

- Mendorong petugas farmakovigilans di fasyankes untuk melaporkan kejadian efek samping obat baik melalui penyampaian secara langsung maupun melalui media sosial
- Mendorong petugas farmakovigilans di fasyankes untuk melaporkan kejadian efek samping obat pada saat dilakukan pemeriksaan rutin sarana oleh petugas

c. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,3	109,13	Sangat Baik 

Indikator kinerja persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga yang dipilih secara targeted melalui tahap evaluasi, kajian risiko, diperiksa, dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan memperhatikan aspek:

1. Kesesuaian target sampel UPT (bobot 20%);
2. Kesesuaian parameter uji (bobot 20%);
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan (bobot 20%);
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel (bobot 10%);
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian (bobot 10%); dan
6. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya (bobot 20%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 6 (enam) aspek tersebut dengan nilai triwulan 2 adalah 87,3% dari target 80%. Terdapat 4 aspek dengan nilai realisasi 100% dan 2 aspek yang nilai realisasi dibawah 100% yaitu Kesesuaian parameter uji dan ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian. Oleh karena itu, sesuai jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 109,3% dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,3	87,3	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan realisasi triwulan II lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yaitu triwulan I, turun dari 98,3% menjadi 87,3% hal ini dikarenakan terdapat 2 aspek penilaian mengalami penurunan, yaitu Kesesuaian parameter uji dan ketepatan waktu pelaporan.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,3	109,13	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 109,13% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan 2 dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian pada triwulan ini dapat dicapai dikarenakan implementasi strategi sampling yang lebih terstruktur, pengembangan kemampuan penguji, dan percepatan pengadaan untuk keperluan penyelesaian sampel juga turut berkontribusi pada pencapaian yang melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kolaboratif antara tim pemeriksaan, pengujian, dan pengadaan membuahkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.

Meskipun pencapaian pada triwulan II menunjukkan penurunan realisasi dibandingkan dengan realisasi triwulan I, namun realisasi masih memenuhi target tahunan. Adapun penyebab turunnya realisasi triwulan 2 dikarenakan terdapat 46 sampel belum selesai dikerjakan terkendala pada ICPMS sehingga terjadi antrian pada pengujian yang menyebabkan 2 aspek penilaian mengalami penurunan. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tim pemeriksaan dan pengujian telah bekerja dengan sangat efisien. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan sampling dengan

mempertimbangkan evaluasi risiko sampel dan sarananya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan sampling beberapa jenis pangan dan sarana serta sekaligus dengan kegiatan pemeriksaan sarana pada saat sekali kegiatan perjalanan dinas, serta kemampuan penguji terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

Kerja sama dengan tim teknis dan bagian pengadaan juga turut berperan dalam pencapaian target. Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan prioritas mengikuti kebijakan efisiensi dan negosiasi yang baik antara tim pengadaan dengan pihak penyedia. Dukungan pihak penyedia yang cepat tanggap dalam menyediakan dan mengirimkan kebutuhan laboratorium serta bagian keuangan yang lebih cepat dalam menyelesaikan proses keuangan walaupun jumlahnya berkurang namun tidak mempengaruhi ritme pekerjaan sehingga sangat signifikan membantu pencapaian target.

6. Upaya peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan harus dilakukan untuk tetap memenuhi target tahunan, upaya-upaya yang dapat dilakukan harus bisa memenuhi semua aspek penilaian indikator, diantaranya melakukan manajemen pengujian sampel sehingga tidak mengalami keterlambatan pengujian, dan menambahkan sumber daya yang terbatas untuk mendukung penyelesaian pekerjaan sesuai timeline yang telah ditentukan.

D. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa

inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji dari Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- 2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	Sangat Baik 

Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar sampai dengan Triwulan II adalah 100%. Dibandingkan dengan target Triwulan II sebesar 100% maka capaian kinerja adalah 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh insiden keracunan pangan yang terjadi telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
-------------------	----------------	-----------------	------------

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	0	100	Lebih Tinggi dari Triwulan sebelumnya
--	---	-----	---------------------------------------

Realisasi pada Triwulan II adalah 100% yang menunjukkan bahwa sampel KLB yang terjadi yaitu sebanyak 2 kasus telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Hal ini meningkat dibandingkan Triwulan I dimana capaian adalah 0% karena pada Triwulan I tidak terjadi kejadian KLB keracunan pangan. Upaya tersebut perlu terus dipertahankan pada triwulan selanjutnya untuk memastikan seluruh kasus KLB keracunan Pangan telah dilakukan pengujian untuk mengkonfirmasi agen penyebab KLB.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	Tercapai 

Dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 sebesar 100% maka realisasi Triwulan II telah tercapai 100 % dengan kategori "Tercapai". Namun demikian diperlukan upaya keras untuk menindaklanjuti setiap kejadian KLB yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya agar target pada akhir tahun tersebut dapat dicapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian pada triwulan II didukung oleh beberapa faktor diantaranya, Koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor khususnya Dinas

Kesehatan dan Puskesmas yang menjadi Lokasi kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan serta kesiapan dari tim penanggulangan KLB pada BBPOM di Gorontalo untuk melakukan analisis terhadap data epidemiologi dan melakukan pengujian terhadap agen yang diduga menjadi penyebab KLB

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang mendukung penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di Provinsi Gorontalo melibatkan sinergi antara sektor kesehatan, pengawasan pangan, dan kebencanaan. Program-program tersebut antara lain:

1. Penguatan Surveilans Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Program ini dikelola oleh Dinas Kesehatan dan bertujuan untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespons kejadian luar biasa secara cepat.
2. Program KIE Keamanan Pangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh BBPOM di Gorontalo baik melalui edukasi langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, yang secara tidak langsung mendukung pencegahan dan penanganan KLB.
3. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang terus dilakukan setiap tahun di Kabupaten/Kota. Meskipun bersifat umum, GERMAS mendukung edukasi konsumsi pangan aman dan sehat, sehingga membantu pencegahan KLB dari sisi perilaku masyarakat.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian persentase sampel KLB (Kejadian Luar Biasa) keracunan pangan yang diuji sesuai standar di Provinsi Gorontalo, diperlukan sejumlah upaya strategis dan terpadu, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Memastikan laboratorium pengujian memiliki peralatan dan metode yang sesuai standar, serta sumber daya manusia sehingga mampu melakukan pengujian sampel KLB secara cepat dan akurat.

2. Respons Cepat terhadap KLB, membentuk tim reaksi cepat yang dapat menindaklanjuti pengambilan sampel secara representatif dan tepat waktu dan melakukan analisis epidemiologi sesuai prosedur.
3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor, Memperkuat koordinasi antara BBPOM dengan Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan instansi terkait agar pelaporan KLB segera ditindaklanjuti dengan pengujian yang tepat dan sesuai standar.
4. Pemantauan dan Evaluasi berkala melakukan monitoring rutin terhadap proses penanganan KLB dan capaian indikator, serta evaluasi terhadap hambatan yang terjadi agar perbaikan terus-menerus bisa dilakukan.

Kendala yang ditemukan dalam proses penanganan sampel KLB KP :

1. Data investigasi KLB yang diberikan petugas Dinas Kesehatan tidak lengkap sehingga petugas BBPOM di Gorontalo kesulitan menentukan agen penyebab. Petugas Dinas Kesehatan belum memuat informasi epidemiologi yang lengkap, seperti identitas kasus, riwayat paparan, dan kronologi kejadian, sehingga pengujian tidak dapat langsung dilakukan saat sampel tiba di BBPOM di Gorontalo.
2. Kurangnya keterlibatan BBPOM di Gorontalo dalam melakukan investigasi dan pengambilan sampel. Pada kasus KLB KP tahun 2025 proses investigasi dan pengambilan sampel dilakukan sepenuhnya oleh petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan. BBPOM di Gorontalo hanya melakukan penentuan agen penyebab dan pengujian.
3. Proses penanganan sampel baik dari segi jumlah maupun kondisi fisik tidak sesuai dengan persyaratan minimal jumlah sampel untuk dilakukan pengujian laboratorium, sehingga sampel tidak dapat dilakukan pengujian dan hasil pengujian tidak valid.

Rekomendasi

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan/ Tim Gerak Cepat penanganan KLB terkait kelengkapan laporan investigasi KLB KP.
2. Mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kotabagar BBPOM di Gorontalo dilibatkan dalam tim TGC KLB KP

Koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait persyaratan pengambilan sampel dan jumlah sampel KLB KP yang akan dilakukan pengujian.

E. Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	93,6	117	Tidak dapat disimpulkan 

Indikator kinerja persentase sampel PIRT beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sampel pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko, diperiksa, dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya dengan memperhatikan aspek kesesuaian target sampel (bobot 20%), kesesuaian parameter uji (bobot 20%), ketepatan pengambilan kesimpulan (bobot 20%), ketepatan waktu pengambilan sampel (bobot 10%), ketepatan waktu pelaporan (bobot 10%), dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya (bobot 20%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 6 (enam) aspek tersebut dengan nilai triwulan II adalah 93,6% dari target 80%. Terdapat 4 aspek dengan nilai realisasi dibawah 100% dan hanya 2 aspek yang nilai realisasinya 100,0%. Berdasarkan jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 117% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
-------------------	----------------	-----------------	------------

Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,2	93,6	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya
---	------	------	---------------------------------------

Realisasi indikator Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I terdapat perbedaan antara matriks perhitungan dengan rumus yang terdapat dalam manual IKU untuk aspek pemenuhan target sampel yaitu menggunakan satuan persen pada hasil akhirnya. Setelah dilakukan perhitungan kembali menggunakan manual IKU maka diperoleh nilai 100% untuk aspek pemenuhan target sampel sehingga realisasi triwulan menjadi 98,0% dan capaian 122,5% dengan kategori tidak dapat disimpulkan (>110%). Jika realisasi triwulan II dibandingkan dengan realisasi triwulan II dengan menggunakan rumus yang sama, maka realisasi triwulan II mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh turunnya realisasi beberapa aspek penilaian yaitu pemenuhan target sampel PIRT, kesesuaian parameter uji, dan ketepatan pengambilan keputusan.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	93,6	117	Akan Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 117% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan II sudah melebihi target tahunan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada indikator Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terdapat hasil evaluasi dari unit pengampu, hasil dari evaluasi tersebut dijadikan pertimbangan terhadap penilai mandiri UPT, dimana dari evaluasi tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap penilaian dari UPT sehingga menyebabkan penurunan realisasi dari triwulan sebelumnya, ketidaksesuaian tersebut adalah terdapat 1 sampel PIRT bulan Januari perlu dilakukan pengujian ulang untuk parameter As dan Cd (ketidaksesuaian syarat keberterimaan untuk PIRT), dan Salmonella (sebelumnya uji Staphylococcus, seharusnya Salmonella untuk PIRT), sehingga menyebabkan penurunan nilai pada aspek pemenuhan target sampel PIRT, kesesuaian parameter uji, dan ketepatan pengambilan keputusan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Salah satu kegiatan yang menyebabkan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah dikarenakan tahun 2025 merupakan awal dari renstra baru sehingga rumusan untuk menghitung capaian pernyataan kinerja disesuaikan dari tahun sebelumnya dan terdapat perbedaan antara manual IKU yang baru dengan tabel perhitungan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja, yang berdampak pada adanya kinerja yang tidak mencapai target pernyataan kinerja. Selain itu, adanya evaluasi dari unit pengampu indikator dapat menjadi penunjang untuk meningkatkan penilaian mandiri UPT.

Kerja sama dengan tim teknis dan bagian pengadaan juga turut berperan dalam pencapaian target. Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan prioritas mengikuti kebijakan efisiensi dan negosiasi yang baik antara tim pengadaan dengan pihak penyedia. Dukungan pihak penyedia yang cepat tanggap dalam menyediakan dan mengirimkan kebutuhan laboratorium serta

bagian keuangan yang lebih cepat dalam menyelesaikan proses keuangan walaupun jumlahnya berkurang namun tidak mempengaruhi ritme pekerjaan sehingga sangat signifikan membantu pencapaian target.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja indikator "Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan", perlu dilakukan perbaikan proses penilaian, penggunaan manual IKU yang konsisten, peningkatan kerja sama tim, pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, peningkatan kapasitas staf, dan perencanaan pengadaan yang lebih baik. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan kinerja dapat meningkat dan capaian target dapat tercapai

. 6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	94,12	101,19	Sangat Baik 

Indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 2 (Dua) aspek tersebut dengan nilai triwulan II adalah 94,12% dari target 93,01%, sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 101,19% dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	94,12	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder jika dibandingkan realisasi triwulan

II lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yaitu triwulan I, turun dari 100% menjadi 94,12% hal ini dikarenakan 1 aspek tindak lanjut dari pelaku usaha mengalami penurunan.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	94,12	101,19	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 101,19% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan II dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan oleh petugas yang telah melaksanakan tidak lanjut pemeriksaan dan terus meminta pelaku usaha dan lintas sektor agar menindaklanjuti rekomendasi yang telah diterbitkan dan dilaporkan tepat waktu, dengan upaya selalu mengingatkan pelaku usaha agar

melakukan perbaikan secara bertahap sehingga diperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarannya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan peronil terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan agar capaian indikator kinerja ini terus dipertahankan adalah petugas pemeriksaan harus mampu terus berkomunikasi terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah diberikan, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha pentingnya melakukan perbaikan secara bertahap untuk menjamin ketersediaan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

G. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Tidak dapat disimpulkan 

Realisasi kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwa dari 2 sarana produksi obat tradisional berupa Usaha Mikro obat Tradisional yang sarana ditargetkan 2 sarana telah berhasil diperiksa keduanya dengan tepat waktu di

triwulan 2, meskipun capaian kinerja tinggi namun dikategorikan tidak dapat disimpulkan.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	100	Lebih tinggi dari Triwulan sebelumnya

Pada triwulan pertama (TW I), realisasi kinerja menunjukkan bahwa tidak ada sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan persentase realisasi sebesar 0%. Namun, pada triwulan kedua (TW II), terjadi peningkatan signifikan dalam kinerja, dengan persentase realisasi mencapai 100%.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Tercapai 

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis Penyebab Keberhasilan:

1. Efisiensi Proses: Peningkatan efisiensi dalam proses pemeriksaan
2. Komitmen Tim: Dedikasi dan komitmen tinggi dari tim pengawas dalam menjalankan tugas mereka, memastikan bahwa semua sarana produksi diperiksa sesuai ketentuan.
3. Sumber Daya yang Memadai: Ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dari segi inspektur maupun anggaran, untuk mendukung proses pemeriksaan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan dalam jumlah petugas dapat menghambat proses pemeriksaan sehingga target kinerja tiap komoditi digilir sesuai perencanaan kerja agar dapat tercapai.
2. Kurangnya Kesadaran Pelaku usaha: Beberapa pelaku usaha mungkin kurang memahami atau tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga memerlukan upaya penindakan yang lebih intensif.

6. Upaya peningkatan Kinerja

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi tim pemeriksa untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka dalam melakukan pemeriksaan
2. Peningkatan Kesadaran Pelaku usaha : Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan panduan yang jelas dan mudah dipahami.
3. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh pelaku usaha agar memastikan bahwa upaya peningkatan kinerja berjalan sesuai rencana.

H. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-----------------	--------------------	-----------	----------

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	96,97	121,21	Tidak dapat disimpulkan 
--	----	-------	--------	--

Indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah Indikator yang mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain, Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi 3 aspek yaitu:

- 1) Ketepatan waktu pelaporan
- 2) Ketepatan tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan
- 3) Ketepatan Grading

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari rata-rata 3 (tiga) aspek tersebut dengan nilai triwulan II adalah 96,97% dari target 80%. Terdapat 1 aspek dengan nilai realisasi dibawah 100% dan 2 aspek yang nilai realisasinya 100,0%. Berdasarkan jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 121,21% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (>110%).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
-------------------	----------------	-----------------	------------

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	96,97	-
--	---	-------	---

triwulan II, Untuk Indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya dikarenakan indikator ini diukur mulai di sehingga tidak ada data realisasi triwulan I yang dapat digunakan sebagai pembanding

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	96,97	121,21	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 121,21% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan 2 dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan oleh petugas yang telah melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan dilaporkan tepat waktu, serta ketapan tindak lanjut dan grading terhadap hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan, sehingga diperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan

Meskipun pencapaian pada triwulan pertama menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta

berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarannya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan personil terlatih yang dapat bekerja lebih cepat sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

6. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan agar capaian indikator kinerja ini terus dipertahankan adalah petugas pemeriksaan harus mampu melakukan pemeriksaan dan pelaporan tepat waktu serta melakukan pemberian grading dan tindak lanjut yang tepat sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.

I. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-----------------	--------------------	-----------	----------

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	96,98	103,17	Sangat Baik 
--	----	-------	--------	--

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dari target sebesar **94%**, realisasi capaian mencapai **96,98%**, atau setara dengan **103,17%** dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini dikategorikan sebagai **"Sangat Baik"**, mencerminkan komitmen dan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap sarana distribusi Sediaan Farmasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan tindak lanjut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW 2 distribusi obat tradisional 4 sarana, suplemen kesehatan 2 sarana dan kosmetik 22 sarana

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	96,98	Lebih Tinggi dari Triwulan sebelumnya

Jika pada triwulan I realisasi kinerja berada di angka **0%**, maka pada triwulan II meningkat tajam menjadi **96,98%**.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang sangat berarti dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi Sediaan Farmasi. Kinerja triwulan II tercatat **lebih tinggi dari triwulan sebelumnya**, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan peningkatan komitmen terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	96,98	103,17	Tercapai 

Dari target tahunan sebesar **94%**, realisasi pada triwulan ini telah mencapai **96,98%**, atau setara dengan **103,17%** dari target tahunan.

Capaian ini dikategorikan sebagai "**Tercapai**", bahkan melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, serta menunjukkan bahwa upaya pengawasan terhadap sarana distribusi Sediaan Farmasi telah berjalan optimal sejak awal tahun.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada Triwulan II menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antara tim pemeriksa dengan instansi terkait. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pelaksanaan pengujian dan tindak lanjut ditemukan bersumber dari kurangnya sinergi lintas fungsi, belum optimalnya distribusi tugas, serta keterbatasan pemanfaatan sistem informasi pendukung.

Salah satu penyebab penurunan kinerja yang teridentifikasi adalah belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya, baik dari sisi jumlah dan kompetensi tenaga pemeriksa/inspektur maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Keterbatasan ini menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, khususnya dalam proses pengumpulan data dan pelaporan hasil pengawasan.

Namun demikian, terdapat pula faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja pada indikator tertentu, seperti komitmen tim pemeriksa dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku secara konsisten. Disamping itu, pemanfaatan **sistem informasi dan media komunikasi digital, seperti grup WhatsApp**, turut mendorong kecepatan pemantauan serta pelaporan hasil pengawasan secara lebih real-time dan terkoordinasi.

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan, beberapa langkah strategis direkomendasikan, antara lain:

1. **Optimalisasi sumber daya manusia** melalui penguatan kapasitas teknis pemeriksa dan efisiensi distribusi tugas berbasis risiko dan prioritas pengawasan.
2. **Peningkatan koordinasi lintas sektor**, khususnya dengan instansi terkait, guna menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
3. **Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi komunikasi** secara maksimal untuk mendukung proses pemantauan, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis data.
4. **Penguatan budaya kerja berbasis regulasi**, dengan memastikan seluruh kegiatan pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas pengawasan dapat meningkat secara signifikan, serta capaian indikator kinerja dapat lebih optimal dan berkelanjutan dalam triwulan berikutnya

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pengawasan distribusi farmasi pada Triwulan II tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang secara strategis serta berbasis risiko. Salah satu program yang memberikan kontribusi signifikan adalah **program intensifikasi pengawasan distribusi farmasi**, khususnya melalui kegiatan intensifikasi pengawasan pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Pelaksanaan program ini dilakukan secara terjadwal dan berbasis risiko, sehingga mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran secara lebih tepat sasaran dan efisien.

Selain itu, kegiatan **pembinaan teknis dan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha distribusi farmasi** juga menjadi faktor penting yang mendukung peningkatan pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, menjalin kerja sama lintas sektor bersama Dinas Kesehatan tingkat kota dan kabupaten. Melalui sinergi ini, pesan-pesan regulatif dapat tersampaikan secara lebih luas dan efektif kepada para pemangku kepentingan di lapangan.

Secara umum, pelaksanaan program intensifikasi dan kegiatan pembinaan regulatif terbukti berkontribusi dalam menurunkan tingkat pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap sistem distribusi yang aman dan sesuai standar. Namun demikian, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas implementasi, jangkauan wilayah pengawasan, serta kualitas komunikasi antar sektor tetap diperlukan guna menjamin keberlanjutan hasil kinerja di masa yang akan datang.

Dengan penguatan dan perluasan cakupan kegiatan serupa, diharapkan capaian kinerja dapat terus meningkat secara berkesinambungan dan memberikan dampak positif terhadap perlindungan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pengawasan pada Triwulan II, telah dilakukan berbagai upaya strategis yang diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan sinergi lintas sektor. Salah satu langkah nyata adalah penguatan kapasitas SDM, yang diwujudkan melalui pelatihan teknis bagi petugas pemeriksa. Sebanyak dua orang mengikuti pelatihan dasar untuk menjadi inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), serta dua orang lainnya mengikuti pelatihan inspektur pangan muda. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis petugas, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih responsif, profesional, dan berbasis risiko.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi pilar penting dalam mendukung sistem pelaporan, pemantauan, dan analisis data secara real-time. Hal ini memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta memperkuat transparansi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Koordinasi lintas sektor juga ditingkatkan sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam implementasi program pengawasan yang didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas cakupan pengawasan serta menyelaraskan kebijakan dan prioritas antar wilayah.

Lebih lanjut, pendekatan pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha terus dikedepankan sebagai bentuk pengawasan preventif. Melalui edukasi yang berkesinambungan, pelaku usaha diharapkan semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan distribusi farmasi, sehingga tercipta kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, kinerja pengawasan pada Triwulan II diharapkan mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi efektivitas pelaksanaan, maupun dari segi dampak terhadap perlindungan masyarakat.

J. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	98,21	130,95	Tidak dapat disimpulkan 

Indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan, Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa (20%), Ketepatan waktu pelaporan (70%), dan kesesuaian tindak lanjut (10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 3 (Tiga) aspek tersebut dengan nilai triwulan II adalah 98,21% dari target 75%. Aspek Ketepatan Tindak Lanjut hanya mencapai 68,21% dikarenakan terdapat 1 sarana yang belum ditindaklanjuti sesuai pedoman di triwulan sebelumnya, sehingga diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 130,95% dengan kategori tidak dapat disimpulkan (>110%).

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,16	98,21	Lebih Tinggi dari Triwulan sebelumnya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan realisasi triwulan II lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yaitu triwulan I, naik dari 94,16% menjadi 98,2% hal ini dikarenakan 1 aspek penilaian mengalami peningkatan, yaitu Kesesuaian kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	98,21	130,95	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 130,95% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan II dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan oleh petugas yang telah melaksanakan pemeriksaan sarana peredaran pangan olahan sesuai target yang ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu, serta ketapan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana peredaran pangan olahan, sehingga diperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan.

Meskipun pencapaian pada triwulan pertama menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarananya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan peronil terlatih

yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya yang perlu dilakukan agar capaian indikator kinerja ini terus dipertahankan adalah petugas pemeriksaan harus mampu melakukan pemeriksaan sesuai target yang ditetapkan dan pelaporan tepat waktu serta melakukan pemberian tindak lanjut yang tepat sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana peredaran pangan olahan.

K. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	97,97	111,20	Tidak dapat Disimpulkan 

Realisasi kinerja yang melebihi target menunjukkan bahwa BPOM berhasil melakukan pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan lebih dari yang diharapkan. Capaian sebesar 111,20% mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Namun, kategori "Tidak dapat disimpulkan" menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja tinggi, ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai kualitas dan dampak dari pengawasan tersebut.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
-------------------	----------------	-----------------	------------

Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,75	97,97	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya
--	-------	-------	---------------------------------------

Realisasi kinerja pada triwulan kedua menunjukkan penurunan dibandingkan dengan triwulan pertama. Meskipun penurunan ini relatif kecil, dari 99,75% menjadi 97,97%, tetap perlu dilakukan analisis untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	97,97	113.22	Tercapai 

Indikator kinerja ini memiliki target flat setiap bulan dalam setahun yaitu target bulanan sama dengan target tahunan sehingga realisasi kinerja tahunan dapat diperoleh dari realisasi kinerja triwulan karena nilainya sama. Berdasarkan nilai capaian indikator ini yaitu 113,22% maka kategorinya adalah tercapai karena capaian indikator kinerja triwulan II dibandingkan dengan target tahunan sudah lebih besar dari 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tercapainya target indikator kinerja ini disebabkan oleh petugas yang telah memahami target pengawasan iklan di semua komoditi, melaksanakan pengawasan iklan sesuai target yang ditetapkan dan dilaporkan tepat waktu, serta ketapan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh capaian melibihi target yang ditetapkan.

Meskipun pencapaian pada triwulan pertama menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu berhati-hati dalam memproyeksikan kinerja untuk triwulan kedua dan seterusnya. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan kendala teknis dapat mempengaruhi kinerja pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian yang lebih cepat ini tidak serta merta berarti akan berlanjut pada periode berikutnya tetapi yang utama dapat memberikan dampak positif semangat kerja petugas, kepercayaan publik terhadap pengawasan pangan di Provinsi Gorontalo, serta meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ini juga membuka peluang untuk melakukan inovasi yang dapat semakin meningkatkan efektifitas pengawasan. Berdasarkan pencapaian yang lebih tinggi dari target ini, direkomendasikan untuk meninjau ulang target pada triwulan kedua dan seterusnya. Namun, proyeksi target jangka panjang harus tetap realistis untuk menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adanya pengelolaan yang lebih efisien atau pengalokasian sumber daya yang tepat membuat hasilnya bisa melebihi target. Melalui alokasi anggaran yang lebih tepat pada kegiatan pemeriksaan dengan mempertimbangkan evaluasi risiko sarannya, efektivitas tim dalam mengelola waktu dan pekerjaan yang melakukan kegiatan pemeriksaan sarana, serta kemampuan peronil terlatih yang dapat bekerja lebih cepat karena beban kerja lebih sedikit sehingga capaian kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan.

6. Upaya Peningkatan kinerja

paya yang perlu dilakukan agar capaian indikator kinerja ini terus dipertahankan adalah petugas pengawasan harus mampu melaksanakan pengawasan iklan sesuai target yang ditetapkan dan pelaporan tepat waktu serta melakukan pemberian tindak lanjut yang tepat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

3.1.2. Sasaran Strategis “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

A. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,7	68,1	105,26	Sangat Baik 

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang dibagi ke dalam 4 tingkatan yaitu tingkat 1 (Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota), tingkat 2 (Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota), tingkat 3 (Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi), dan tingkat 4 (Laboratorium Balai Regional). Balai Besar POM di Gorontalo termasuk dalam laboratorium tingkat 3 dengan aspek pemenuhan SKL terdiri dari komponen ruang lingkup (bobot 50%), peralatan (bobot 20%), kompetensi laboratorium (bobot 20%), dan metode yang terverifikasi (bobot 10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 4 (empat) aspek tersebut dengan nilai triwulan kedua adalah 68,1% dari target 64,7%. Rincian nilai pemenuhan keempat aspek tersebut adalah ruang lingkup (82,4%), peralatan (71,8%), kompetensi laboratorium (50%), dan metode yang terverifikasi (25,7%). Berdasarkan jumlah pembobotannya maka diperoleh capaian kinerja untuk indikator ini adalah 105,26% dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$). Namun, telah diusulkan perubahan target triwulan yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM sesuai surat Kepala BBPOM di Gorontalo nomor B-PR.04.02.23A.05.25.167 tanggal 28 Mei 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025 dengan alasan bahwa realisasi yang diperoleh hingga triwulan kedua sudah melebihi dari target tahunan yang ditetapkan. Persetujuan perubahan target juga

telah disampaikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM melalui surat nomor PR.07.21.07.25.243 tanggal 14 Juli 2025 perihal Tanggapan terhadap Penyesuaian Target Indikator Kinerja BBPOM di Gorontalo yang menetapkan perubahan target triwulan menjadi triwulan kedua (64,9%), triwulan ketiga (65,0%), dan triwulan keempat (65,1%). Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai saran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyesuaian RAPK melalui Aplikasi Simetris sesuai hasil reviu
- b. Mengunggah revisi dokumen RAPK yang telah ditetapkan melalui tautan bit.ly/PK-RAPK-2025 khususnya pada folder “Revisi RAPK 2025”, dan
- c. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian data pada monev kinerja.

Berdasarkan penetapan target revisi dilakukanlah perhitungan kembali capaian triwulan kedua sehingga menggunakan nilai 68,1% dari target revisi 64,9% maka diperoleh capaian 104,93% dengan kategori sangat baik ($100\% < x \leq 110\%$). Sampai pada laporan kinerja interim triwulan kedua ini dilaporkan, tindak lanjut tersebut masih sementara berproses dikerjakan oleh bagian perencana Balai Besar POM di Gorontalo. Oleh karena itu, perbaikan realisasi dan capaian triwulan kedua akan disampaikan kembali pada laporan kinerja interim triwulan ketiga.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	68,3	68,1	Lebih rendah dari Triwulan sebelumnya

Berdasarkan perbandingan data terlihat adanya penurunan realisasi pada triwulan kedua. Setelah dilakukan penelusuran bersama verifikator dari PPPOMN diketahui bahwa terdapat perbedaan nilai pada *tools* perhitungan karena ada beberapa baris yang menggunakan inputan nilai manual sementara yang lainnya menggunakan rumus otomatis. Oleh karena itu, sampai laporan kinerja interim ini

dilaporkan, masih berproses koordinasi dengan unit pengampu sebagai verifikator nilai dari indikator ini. Perbaikan hasil perhitungan pada *tools* verifikasi, realisasi, dan capaian akan disampaikan kembali pada laporan kinerja interim triwulan ketiga.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	68,1	104,60	Tercapai 

Target tahunan untuk indikator kinerja ini adalah 65,1% sehingga jika realisasi triwulan kedua dibandingkan dengan target tahunan maka diperoleh capaian 104,60% dengan kategori tercapai karena capaiannya sudah lebih besar dari 100%. Meskipun pencapaian pada triwulan kedua menunjukkan hasil yang sangat positif, namun tetap perlu diperlukan pengawalan dan evaluasi kinerja agar capaian triwulan berikutnya hingga tahunan dapat mencapai target yang ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian 105,26% di triwulan kedua menunjukkan efektivitas perencanaan dan eksekusi program laboratorium yang baik. *Roadmap* perencanaan yang disusun untuk keempat aspek tersebut dapat dilaksanakan sesuai jadwal dikarenakan kerja sama yang baik antara seluruh tim pengujian, tim pengadaan, dan tim mutu dalam menyiapkan sarana prasarana dan sumber daya kebutuhan pengujian. Namun demikian keberhasilan ini harus dimanfaatkan sebagai pemicu untuk melakukan beberapa peningkatan pada triwulan berikutnya

meliputi evaluasi berkelanjutan terhadap indikator mutu kinerja teknis dan manajerial, optimalisasi penggunaan sumber daya agar capaian tetap berkelanjutan, dan peningkatan standar kualitas di atas persyaratan minimum akreditasi sehingga kapasitas laboratorium dapat semakin baik yang akhirnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengawasan keamanan dan mutu produk beredar.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program diterapkan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah identifikasi potensi ruang lingkup regionalisasi yang sejalan dengan ruang lingkup akreditasi dan kebutuhan layanan publik yang dapat menjadi prioritas penambahan untuk meningkatkan nilai pemenuhan, peningkatan kompetensi penyelesaian masalah ringan dan kalibrasi/verifikasi internal pada peralatan sehingga meningkatkan umur pemakaian alat, optimalisasi sisa anggaran untuk pengadaan peralatan yang rusak atau penambahan alat yang urgensinya mempercepat kinerja laboratorium, implementasi program *upskilling* berbasis kebutuhan spesifik laboratorium, seperti pelatihan pengolahan data statistik atau validasi metode, pemetaan kompetensi personil untuk melihat gap teknis dan non teknis serta intervensi tepat sasaran untuk memperkecil gap tersebut, verifikasi metode analisis dilaksanakan bersamaan dengan pengujian sampel rutin sehingga penyelesaian verifikasi dapat dilakukan secara efisien.

6. Upaya peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja laboratorium agar dapat memenuhi standar kemampuan laboratorium tier 3 yang ditetapkan oleh Badan POM mencakup berbagai aspek manajemen, teknis, dan sumber daya. Berikut adalah uraian upaya-upaya tersebut:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

- a. Pelatihan dan sertifikasi secara berkala untuk analis, teknisi, dan manajer mutu.
- b. *Workshop* dan seminar tentang metode pengujian terbaru, sistem manajemen mutu, dan teknologi laboratorium.
- c. Evaluasi kinerja individu secara rutin serta penilaian kompetensi teknis.

2. Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan
 - a. Menyusun jadwal pemeliharaan preventif dan kalibrasi peralatan secara berkala.
 - b. Dokumentasi penggunaan alat yang tertib dan akurat.
 - c. Penggantian alat yang sudah tidak akurat atau usang.
3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
 - a. Mengimplementasikan standar manajemen mutu seperti ISO/IEC 17025.
 - b. Menyusun dan menjalankan prosedur operasional baku (SOP) untuk setiap proses.
 - c. Audit internal secara rutin untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan tindakan korektif.
4. Pengendalian Mutu Internal dan Eksternal
 - a. Melakukan uji banding (*proficiency testing*) dengan laboratorium lain.
 - b. Menjalankan program uji kinerja antar analis (intra-lab).
 - c. Menetapkan baku mutu dan parameter evaluasi untuk setiap jenis pengujian.
5. Perbaikan Infrastruktur dan Lingkungan Kerja
 - a. Menyediakan ruang laboratorium yang memenuhi syarat teknis dan keselamatan kerja.
 - b. Menjaga kebersihan, pencahayaan, ventilasi, dan suhu sesuai kebutuhan spesifik pengujian.
 - c. Pengelolaan limbah laboratorium yang sesuai dengan regulasi lingkungan.
6. Digitalisasi dan Otomatisasi Proses
 - a. Menggunakan *Laboratory Information Management System* (LIMS) untuk pengelolaan data.
 - b. Otomatisasi proses analitik untuk meningkatkan presisi dan efisiensi.
 - c. Digitalisasi dokumentasi dan pelaporan hasil uji.
7. Peningkatan Komunikasi dan Kolaborasi
 - a. Membangun komunikasi yang efektif antara personel teknis, manajemen, dan pelanggan.
 - b. Kerja sama dengan institusi pendidikan, industri, dan lembaga akreditasi untuk pertukaran ilmu dan benchmarking.
8. Evaluasi dan Tinjauan Manajemen
 - a. Melakukan tinjauan manajemen (*management review*) secara berkala.

- b. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) dan memantau pencapaiannya.
Menerapkan budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)

3.1.3. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”

A. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Sumber atau Narasumber KIE
- b) Konten atau Informasi KIE
- c) Pemahaman Audiens KIE
- d) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang dilakukan BBPOM di Gorontalo dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BBPOM di Gorontalo atau menerima produk informasi BBPOM di Gorontalo dalam 3 bulan terakhir.

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-----------------	--------------------	-----------	----------

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,79	102,19	Sangat Baik 
--	-------	-------	--------	--

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Gorontalo memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE langsung/ tatap muka dan KIE melalui media.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 BBPOM di Gorontalo melaksanakan Survei Efektifitas KIE dengan jumlah responden sebanyak 269. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Gorontalo baik KIE secara tatap muka/ langsung dan KIE melalui media.

Tingkat efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilaksanakan oleh UPT BBPOM di Gorontalo pada triwulan ini menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Dengan target efektivitas sebesar 89,82 dan realisasi 91,79 maka capaian pada triwulan II adalah 102,19 % dengan kategori “Sangat Baik”. Hasil ini menegaskan bahwa strategi penyuluhan, distribusi bahan komunikasi, serta metode edukasi yang diterapkan baik melalui kegiatan tatap muka, media cetak maupun digital, berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha maupun masyarakat terhadap pentingnya mutu dan keamanan sediaan farmasi serta pangan olahan. Capaian ini menggambarkan komitmen dan upaya tim BBPOM di Gorontalo dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara inovatif, dan berkelanjutan. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan bahkan

ditingkatkan pada triwulan berikutnya untuk memastikan perlindungan konsumen yang maksimal.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,02	91,79	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan data pada tabel perbandingan realisasi tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT BBPOM di Gorontalo, terlihat adanya peningkatan kinerja dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, nilai realisasi tercatat sebesar 91,02, sedangkan pada Triwulan II meningkat menjadi 91,79. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 0,77 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan efektivitas kegiatan KIE.

Kenaikan ini juga mengindikasikan bahwa strategi atau pendekatan yang diterapkan pada triwulan kedua telah berjalan lebih efektif. Keberhasilan ini dapat menjadi motivasi untuk terus melakukan penguatan pada aspek teknis pelaksanaan KIE, misalnya melalui peningkatan kualitas materi edukasi, pemanfaatan media digital secara lebih luas, serta kolaborasi dengan lintas sektor untuk memperluas cakupan KIE. Dengan menjaga tren positif ini, diharapkan pemahaman masyarakat akan terus meningkat sehingga dapat berkontribusi pada perlindungan masyarakat dari risiko penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,79	102,19	Tercapai 
--	-------	-------	--------	---

Berdasarkan tabel yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT BBPOM di Gorontalo menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2025. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 89,82, sedangkan realisasi yang dicapai sampai dengan triwulan II adalah sebesar 91,79 dengan persentase capaian sebesar 102,19% dengan kategori “Tercapai”.

Capaian ini menandakan bahwa program KIE telah dilaksanakan dengan efektif dan mendapat respons yang baik dari masyarakat, baik dari sisi pemahaman maupun keterlibatan dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi. Namun demikian upaya dan strategi yang konsisten perlu terus dipertahankan sehingga target akhir tahun tetap dapat tercapai.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan hasil survei pada triwulan II tahun 2025, capaian yang diperoleh mencapai target tahun 2025. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

- 1) Konsistensi dalam merencanakan konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang terstruktur, sistematis, dan menarik sesuai dengan usia, domisili perkotaan/ pedesaan, tren terkini, dan minat audiens, baik menggunakan media langsung, media non elektronik, maupun media sosial.
- 2) Inovasi pelaksanaan kegiatan baik KIE langsung maupun KIE media dan melibatkan anggota Satuan Karya Pramuka Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan dalam penyebaran informasi.

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Gorontalo Triwulan II tahun 2025 ini antara lain:

- 1) Melibatkan anggota Satuan Karya Pramuka Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan untuk turut serta menyebarkan informasi terkait obat dan makanan aman dan melakukan sosialisasi Cek KLIK serta pemanfaatan BPOM Mobile.
 - 2) Pembuatan konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
 - 3) Menyediakan konten mengenai obat dan makanan melalui media sosial yang tayangkan setiap hari.
 - 4) Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui pameran dan layanan ULPK.
 - 5) Adanya upaya penganekaragaman KIE dan publikasi informasi melalui kuis pada media sosial untuk meningkatkan ragam dan minat informasi yang disampaikan.
6. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Gorontalo, berbagai upaya strategis dapat dilakukan, baik dari aspek teknis, substansi, maupun kolaboratif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diterapkan:

- a. Segmentasi Sasaran yang Lebih Spesifik Menyesuaikan materi KIE berdasarkan karakteristik audiens, seperti pelajar, ibu rumah tangga, pelaku usaha UMKM, tokoh masyarakat, atau tenaga kesehatan. Segmentasi ini memungkinkan penyusunan pesan yang lebih tepat guna dan relevan dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
- b. Pemanfaatan media digital dan sosial, video edukasi, infografis interaktif, dan webinar agar informasi lebih cepat tersebar dan mudah dipahami, terutama oleh generasi muda. Kampanye daring dapat dikombinasikan dengan hashtag tematik dan kolaborasi dengan influencer lokal.
- c. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan rutin, pembekalan teknik komunikasi publik, dan pemutakhiran materi KIE
- d. Penguatan kemitraan dan kolaborasi dengan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi,

serta komunitas lokal dalam pelaksanaan kegiatan KIE. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan dan memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan.

- e. Penyusunan materi edukasi yang kontekstual dan lokal. Menyusun materi edukatif dengan muatan lokal, bahasa daerah, atau kearifan lokal untuk memperkuat daya serap pesan dan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat.

Dengan kombinasi pendekatan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas KIE secara berkelanjutan, sehingga masyarakat lebih sadar, kritis, dan mandiri dalam memilih serta menggunakan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu.

B. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), dan pangan olahan IRTP. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader.

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	60 %	75 %	125	Tidak dapat disimpulkan 

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di wilayah kerja UPT BBPOM di Gorontalo sampai dengan triwulan II, dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan adalah sebanyak 60 % dengan realisasi sebesar 75 %. Hal ini berarti capaian kinerja berada pada tingkat 125%, yang secara kuantitatif telah melampaui target yang direncanakan dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	15	75	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II, realisasi pelaksanaan tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah 75%. Capaian ini meningkat 60% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 15%.

Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%)
- Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)

- c. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	7 (Jumlah Sekolah)	75 (progres)	-	-

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah sekolah sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres pelaksanaan tahapan program, sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya. Namun demikian BBPOM di Gorontalo pada tahun 2025 optimis dapat menyelesaikan target sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan Rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Triwulan II target progres Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan telah tercapai. Keberhasilan pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Provinsi Gorontalo dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis dan sinergis yang saling mendukung, diantaranya:

1. Dukungan Komitmen dari Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait. Program ini berhasil karena adanya dukungan dan sinergi antara BBPOM di Gorontalo dengan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sejak penentuan sekolah yang menjadi target intervensi maupun koordinasi pelaksanaan kegiatan

2. Dukungan dan Partisipasi Sekolah. Banyak sekolah di Provinsi Gorontalo menunjukkan komitmen dalam menerapkan budaya keamanan pangan, baik melalui integrasi ke dalam pembelajaran, pembentukan kader pangan aman, maupun penerapan kantin sehat dan pengawasan makanan jajanan.

Program Pembudayaan Keamanan Pangan di sekolah-sekolah diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku positif terhadap keamanan pangan sejak usia dini pada siswa dan seluruh komunitas keamanan pangan di Sekolah.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program yang menunjang keberhasilan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan, pelibatan pemangku kepentingan, serta pendekatan edukatif yang partisipatif dan berkelanjutan, diantaranya:

- 1) Program sekolah sehat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan
- 2) Program sekolah Adiwiyata oleh Kementerian Lingkungan Hidup
- 3) Program UKS oleh Pemerintah Daerah
- 4) Pengawasan kantin sehat oleh Puskesmas setempat
- 5) Program sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba) oleh BNN
- 6) Sertifikasi Halal Kantin Sekolah oleh Kementerian Agama

Sinergi dari program tersebut diharapkan dapat mendukung kemandirian sekolah dalam rangka mewujudkan budaya keamanan pangan pada komunitas sekolah.

6. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Provinsi Gorontalo dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis yang bersifat integratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- a. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Lintas Sektor.

Meningkatkan kolaborasi antara BBPOM di Gorontalo dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, dan puskesmas untuk perencanaan dan pelaksanaan program secara sinergis.

- b. Integrasi Materi Keamanan Pangan dalam Kurikulum dan Projek P5. Menyisipkan materi keamanan pangan ke dalam pelajaran seperti IPA, Prakarya, atau P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila). Mengembangkan modul lokal sesuai dengan kearifan budaya Gorontalo agar lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh siswa.
- c. Pemanfaatan Media dan Metode Edukasi yang Inovatif.
Mengembangkan bahan ajar kreatif seperti video animasi, komik, infografis, serta permainan edukatif berbasis digital atau tradisional. Mengadakan kegiatan lomba, kampanye pangan aman, dan pertunjukan seni bertema keamanan pangan untuk meningkatkan partisipasi siswa.
- d. Penguatan Implementasi Kantin Sehat Sekolah
Mendorong penerapan standar stikerisasi kantin sehat, sertifikasi halal dan edukasi Cek KLIK melalui edukasi sebaya bersama anggota Pramuka Satuan Karya Pengawas Obat dan Makanan

C. Jumlah desa pangan aman

Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman yang selanjutnya disebut Program Desa Pangan Aman adalah program yang melibatkan desa dan kelurahan agar memiliki kemandirian dalam menyiapkan sumber daya, kemampuan, dan kemauan dalam mewujudkan keamanan pangan yang meliputi produksi, peredaran, serta konsumsi pangan aman di wilayahnya secara berkelanjutan.

Program Desa Pangan Aman bertujuan untuk membentuk kemandirian dalam:

- a. mewujudkan Keamanan Pangan hingga tingkat perseorangan;
- b. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan Pangan yang aman dan bermutu;
- c. meningkatkan daya saing produk Pangan lokal Desa dan Kelurahan yang aman dan bermutu; dan
- d. meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait Keamanan Pangan yang sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.

Keluaran dari Program Desa Pangan Aman meliputi:

1. Desa atau Kelurahan memiliki rencana aksi program yang disusun bersama oleh masyarakat Desa atau Kelurahan untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman;
2. Desa atau Kelurahan memiliki Kader Keamanan Pangan;

3. Masyarakat pada Desa atau Kelurahan mendapat intervensi Keamanan Pangan; dan
4. Pelaku usaha Pangan di Desa atau Kelurahan mampu menerapkan cara produksi dan peredaran yang baik

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	70	55	78,57	Cukup 

Pada triwulan II target indikator jumlah desa pangan yang ditetapkan untuk adalah sebanyak 70 %. Namun demikian, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebanyak 55 %, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 78,57% dari target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja dikategorikan dalam kategori "Cukup". Hal ini disebabkan oleh karena adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan sebagai dampak dari efisiensi anggaran. Namun demikian capaian tersebut telah sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada batch 2 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Jumlah desa pangan aman	15	55	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II, realisasi pelaksanaan tahapan program Desa Pangan Aman adalah 55%. Capaian ini meningkat 40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 15%.

Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan program Desa Pangan Aman sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Advokasi Kelembagaan Program Desa Pangan Aman(25%)
- b. Bimtek Kader Keamanan Pangan (25%)
- d. Persiapan Bimtek Komunitas (5%)

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah desa pangan aman	3 (Jumlah Desa)	55 (progres)	-	-

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah Desa Pangan Aman sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres pelaksanaan tahapan program sehingga tidak bisa saling dibandingkan. Namun demikian BBPOM di Gorontalo untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan program Desa Pangan Aman di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya karena pelaksanaan administratif yang baik, tetapi juga hasil dari sinergi antar pihak,

pendekatan berbasis komunitas, dan respons positif masyarakat terhadap isu keamanan pangan diantaranya:

- 1) Dukungan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor. Keberhasilan program Desa Pangan Aman tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah serta keterlibatan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, hingga Bappeda.
- 2) Dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebagai target pelaksanaan kegiatan
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan program Desa Pangan Aman menunjukkan diantaranya adalah:

1. Integrasi dan sinergi dengan program - program dari berbagai lintas sektor yang ada di Desa
2. Dukungan penganggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan oleh Tim Keamanan dan Kader Keamanan Pangan Desa secara berkelanjutan

6. Upaya Peningkatan kinerja

Upaya peningkatan kinerja Program Desa Pangan Aman yang dapat dilakukan dengan memperkuat aspek kelembagaan, edukasi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan Inovasi dan replikasi praktik baik keamanan pangan oleh Komunitas Keamanan Pangan yang ada di Desa
2. Integrasi pelaksanaan program Desa Pangan Aman dengan program Dana Desa dalam rangka mendukung keamanan dan ketahanan pangan Desa
3. Dukungan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi ke Desa/Kelurahan lainnya
4. Peningkatan dan refreshing kapasitas petugas secara berkelanjutan agar efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan semakin baik

D. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat, maupun media massa.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada pendekatan pemberdayaan, di mana komunitas pasar tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pangan yang diperjualbelikan. Sasaran utama dari program ini adalah untuk mengurangi risiko cemaran pangan, penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil, serta meningkatkan kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga mutu produk yang mereka jual

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100	Baik 

Pada triwulan II, program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah menunjukkan capaian kinerja 100%. Dari target 70 %, seluruh tahapan program berhasil direalisasikan sesuai rencana, sehingga masuk dalam kategori “Baik”. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta dukungan

kuat dari berbagai pihak khususnya pemerintah daerah, petugas pasar dan komunitas pasar. Capaian tersebut perlu terus dipertahankan untuk memastikan realisasi target sampai dengan akhir tahun dapat dicapai.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15	70	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan II, realisasi pelaksanaan tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 70%. Capaian ini meningkat 55% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar 15%.

Hal ini menunjukkan upaya kuat yang dilakukan dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%)
2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)
3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (5%)

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 (Jumlah Pasar)	70 (Progres pelaksanaan kegiatan)	-	Terca pai 

Terdapat perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres pelaksanaan tahapan program sehingga tidak bisa saling

dibandingkan. Namun demikian BBPOM di Gorontalo untuk tahun 2025 optimis bahwa target tersebut akan tercapai sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan pencapaian kinerja Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas diantaranya didukung oleh adanya kerja sama dan komunikasi yang baik dengan petugas Pasar yang telah ditunjuk. Di samping itu semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian dari lintas sektor tentang pentingnya mewujudkan keamanan pangan khususnya di Pasar Tradisional turut menjadi pendorong dalam melaksanakan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang telah direncanakan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program yang dapat menunjang keberhasilan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Gorontalo antara lain:

1. Program Edukasi dan Komunikasi Keamanan Pangan

Melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang menysasar pedagang, pengelola pasar, dan konsumen untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pangan yang aman dan higienis.

2. Program Pengawasan Terpadu Pangan Segar dan Olahan

Kegiatan pengawasan rutin terhadap produk pangan yang dijual di pasar dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan mencegah peredaran produk yang berisiko.

3. Program Sanitasi Pasar dan Fasilitas Pendukung

Melibatkan kerja sama dengan dinas terkait untuk meningkatkan sarana sanitasi, seperti ketersediaan air bersih, saluran pembuangan, dan fasilitas cuci tangan di pasar.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Media Sosial

Mendorong penggunaan aplikasi, media sosial, atau platform daring untuk menyebarkan informasi tentang pasar sehat.

6. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Gorontalo, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mendorong partisipasi aktif komunitas dan pedagang dalam menerapkan higiene dan sanitasi di lingkungan Pasar
- 2) Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan dan alokasi anggaran terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana serta media informasi keamanan pangan di Pasar Tradisional
- 3) Pemanfaatan media informasi dan teknologi digital untuk mempercepat diseminasi edukasi keamanan pangan kepada masyarakat dan komunitas pasar

3.1.4 Sasaran Strategis Meningkatnya “pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”

a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25	46,67	186,68	Tidak dapat disimpulkan 

Pada Triwulan II Tahun 2025 BBPOM di Gorontalo telah melaksanakan beberapa tahap pendampingan UMKM sesuai pedoman. Setelah pemetaan pada triwulan I, tahapan pendampingan dilanjutkan dengan melakukan Bimbingan

Teknis dan Fasilitasi Penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB oleh semua UMK yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Capaian pendampingan UMKM yang telah dilakukan pada Triwulan I adalah 186,68%, dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan** karena nilai capaian melebihi 110%. Capaian pendampingan UMKMi BBPOM di Gorontalo sebenarnya telah melampaui target progres pendampingan UMK Triwulan I yaitu 25% dengan realisasi Triwulan II sebesar 46,67%. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap target mengingat besarnya bobot bimbingan teknis sesuai manual IKU.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,67	46,67	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Realisasi kinerja pendampingan UMKM pada triwulan II menunjukkan peningkatan sebesar 36% dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa tahapan pendampingan UMKM telah berjalan sesuai dengan pedoman. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, baik internal BBPOM di Gorontalo maupun eksternal. Peningkatan ini merupakan hasil upaya dan strategi yang tepat untuk mendukung pengembangan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat bahan alam.

Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah setelah UMKM mendapatkan izin edar. Peningkatan realisasi pendampingan UMKM akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu UMKM tumbuh dan berkembang.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	46,67	51,28	Perlu Upaya Keras 

Untuk dapat memenuhi 100% target pendampingan UMKM, BBPOM di Gorontalo perlu untuk melaksanakan semua tahapan pendampingan sesuai pedoman. Capaian yang telah diraih sampai dengan Triwulan II telah sesuai dengan pedoman. Untuk selanjutnya akan dilakukan upaya percepatan fasilitasi bagi UMKM agar dapat memperoleh sertifikat IPCPPOB/CPOTB Bertahap/CPKB pada tahun 2025 ini.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara

pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya kinerja ke depan adalah sebagai berikut :

- Adanya kerjasama dan hubungan yang baik yang telah terbina antara BPOM Gorontalo dengan pemangku kepentingan UMKM
- Sinergitas program pendampingan UMKM yang dilakukan oleh instansi lainnya seperti adanya pemberian bantuan peralatan dan rumah produksi bagi UMKM yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga lainnya seperti Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian dan Pemerintah daerah
- Beberapa UMKM hasil pendampingan pada tahun – tahun sebelumnya telah menunjukkan peningkatan pemasaran dan penerimaan produk
- Melaksanakan Bimbingan Teknis sesuai dengan pedoman, agar terjadi peningkatan dalam penerapan GMP oleh pelaku usaha

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan, antara lain :

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan terkait UMKM
- Program orang tua angkat bagi UMKM

6. Upaya Peningkatan kerja

Dalam rangka meningkatkan mutu dan keamanan produk obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan, upaya peningkatan pendampingan fasilitasi sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam/Kosmetik yang Baik (CPOTB/CPKB) dan Implementasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (IPCPOB) perlu dilakukan. Beberapa upaya peningkatan yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan UMKM

- b. Adanya kewajiban sertifikasi sarana produksi dan kewajiban memiliki izin edar bagi pelaku usaha yang akan mendapatkan bantuan pendanaan dari stakeholder
- c. Kampanye masif terkait program pendampingan UMKM BBPOM di Gorontalo melalui media massa

3.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT”

A. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	11,25	28,13	Kurang 

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM Gorontalo pada triwulan ini masih rendah, yaitu 11,25% dari target 40%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan penindakan. Salah satu penyebab utamanya adalah kegiatan penindakan dilaksanakan pada pertengahan dan akhir TW 2 yaitu bulan Mei dan bulan Juni 2025 dimana relaksasi baru dimulai di pertengahan bulan April 2025. Adanya relaksasi ini juga akhirnya mengembalikan target semula dari 1 perkara menjadi 4 perkara, hal ini kemudian merubah strategi pelaksanaan kegiatan penindakan BBPOM di Gorontalo, akan tetapi untuk capaian perkara sebenarnya sudah ada 3 perkara yang ditangani dalam tahap SPDP dan prosesnya juga sudah berjalan secara progresif serta tidak ditemui hambatan berarti dalam proses penyidikan sehingga tim penindakan BBPOM Gorontalo berkeyakinan bahwa perkara akan dapat diselesaikan di tahun berjalan.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	11,25	Realisasi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi kinerja pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan Triwulan I. Bila pada Triwulan I belum terdapat capaian (0%), maka pada Triwulan II tercapai sebesar 11,25%. Meskipun peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan penindakan, capaian tersebut masih jauh dari target triwulanan sebesar 40%, sehingga tetap perlu mendapat perhatian dan evaluasi.

Peningkatan yang terjadi lebih disebabkan oleh dimulainya kembali kegiatan operasional setelah relaksasi anggaran pada pertengahan April 2025. Dengan dibukanya akses terhadap anggaran, tim penindakan BBPOM Gorontalo dapat mulai melaksanakan penyidikan, yang menghasilkan kemajuan pada beberapa perkara hingga masuk ke tahap SPDP.

Meskipun menunjukkan arah perbaikan, capaian ini belum mencerminkan keberhasilan yang optimal. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas kegiatan penindakan perlu terus dilakukan secara konsisten dan terstruktur pada triwulan berikutnya agar target kinerja tahunan dapat tercapai secara lebih maksimal.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	-------------------	--------------------	-----------	----------

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	11,25	13.5 	Perlu Upaya Keras
---	----	-------	--	-------------------

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%. Namun, berdasarkan realisasi triwulan yang dilaporkan, pencapaian masih berada pada angka 11.25 %, atau 13,5% dari target. Hal ini masuk dalam kategori *Perlu Upaya Keras*, yang mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian kinerja pada indikator *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT* menunjukkan angka 11.5 % pada triwulan ini, jauh di bawah target tahunan sebesar 85%.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian ini antara lain adanya pemblokiran anggaran serta program penghematan anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan intelijen dan proses penindakan di lapangan pada TW sebelumnya sehingga kegiatan penindakan mulai bergerak pada pertengahan Triwulan II, berkat relaksasi anggaran, waktu yang tersedia untuk mengejar target masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi percepatan yang lebih terarah serta optimalisasi sumber daya untuk memastikan penyelesaian perkara berjalan sesuai rencana dan target tahunan dapat dicapai. Ke depan, peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan, penguatan kerja sama

lintas sektor, serta konsistensi dalam implementasi strategi penindakan menjadi kunci utama dalam mendongkrak capaian indikator ini.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk memperbaiki kinerja ke depan, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, khususnya dengan kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, sangat penting untuk mempercepat proses penyidikan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem intelijen berbasis data perlu diperkuat guna mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penyidikan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memperkuat kompetensi petugas di lapangan. Keempat, perlu diperkuat pembentukan dan pembinaan jaringan (TUKBINJAR) Intelijen agar proses pengumpulan informasi lebih efektif dan mendalam dalam mendukung penyidikan. Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan kendala yang muncul dapat segera diatasi. Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan kinerja penyidikan dapat meningkat pada triwulan berikutnya dan target tahunan dapat tercapai secara optimal.

6. Upaya peningkatan kinerja

Untuk mengejar target tahunan sebesar 4 perkara penyidikan, BBPOM Gorontalo fokus pada percepatan pemberkasan 3 perkara yang saat ini sudah dalam tahap SPDP. Ketiga perkara tersebut menunjukkan progres positif dan diharapkan segera dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, kejaksaan, dan anggota CJS terus ditingkatkan guna memperlancar proses penyidikan. Optimalisasi fungsi intelijen melalui jejaring TUKBINJAR juga dilakukan untuk mengidentifikasi satu perkara tambahan yang diperlukan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

3.1.6. Sasaran Strategis Meningkatnya “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif”

A. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100	Baik 

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan laporan analisis terkait dugaan tindak kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah melalui proses pemeriksaan laboratorium, penelaahan, serta pelaporan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada triwulan ini, target kinerja yang ditetapkan adalah **50% dari total laporan yang masuk** harus diselesaikan sesuai standar. Realisasi yang dicapai juga menunjukkan angka **50%**, sehingga menghasilkan tingkat capaian **100%** terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan

secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun).**
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun).**

Berdasarkan ketentuan tersebut maka analisis pelaksanaan laporan analisis untuk Triwulan II telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan sesuai dengan surat dari Direktorat Siber Obat dan Makanan No B-PR.09.02.63.04.25.156 Tanggal 14 april 2025 tentang rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM Triwula II tahun anggaran 2025 BBPOM Gorontalo telah mengirimkan laporan dengan tepat waktu.

Adapun dan Laporan tindaklanjut rekomendasi dan laporan analisis akan di laporkan pada triwulan 4.

2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Keterangan
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	Realiasasi sama dari triwulan sebelumnya

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)** dan Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar akan tetap bernilai 50% sampai Triwulan 3 dan baru akan berubah pada triwulan 4 dengan diselesaikannya laporan analisis dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal.

3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TRIWULAN	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	50	55,55	Perlu Upaya Keras 

Hasil realisasi kinerja Triwulan 2 terhadap target tahunan menunjukkan capaian sebesar 55,55%. Capaian ini dikategorikan sebagai *Perlu Upaya Keras*. Namun demikian, hal ini disebabkan karena periode pelaksanaan kegiatan masih berada pada Triwulan 2, dan nilai untuk penilaian Indikator kinerja ditetapkan di angka 50% sampai TW 3 sehingga capaian sementara ini belum sepenuhnya mencerminkan

kinerja tahun secara keseluruhan. Diharapkan dengan optimalisasi pelaksanaan program dan konsisten dalam pelaporan maka target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja pada Triwulan 2 tahun 2025 sebesar 55,55% masih tergolong rendah dibandingkan target tahunan 90%. Hal ini disebabkan karena kegiatan baru berjalan di pertengahan tahun serta masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas laporan siber. Untuk perbaikan ke depan, perlu dilakukan penguatan koordinasi, optimalisasi sistem pelaporan, dan monitoring berkala guna memastikan target tahunan dapat tercapai.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan 2 memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja, meskipun belum seluruhnya memberikan dampak optimal. Kegiatan pengumpulan dan analisis data intelijen siber serta penyusunan laporan analisis kejahatan telah mulai dijalankan, namun masih dalam tahap awal sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target belum signifikan. Beberapa hambatan yang memengaruhi pencapaian kinerja antara lain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas laporan siber yang dihasilkan serta kebutuhan penyesuaian mekanisme kerja antar bagian. Di sisi lain, kegiatan koordinasi internal dan pembekalan teknis awal telah memberi dasar yang baik untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Dengan penguatan implementasi program yang telah direncanakan, kontribusi terhadap pencapaian target kinerja tahunan diharapkan akan semakin meningkat.

3.1.7 Sasaran Strategis Layanan Publik UPT yang Prima

A. Layanan Publik UPT yang Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%)

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP)

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM

Untuk Indikator Ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

B. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan

profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Untuk Indikator Ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3.1.8 Sasaran Strategis Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

A. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM

Untuk Indikator Ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Untuk Indikator Ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi

Untuk Indikator Ini di triwulan II tahun 2025 belum dilakukan perhitungan capaian kinerja dikarenakan targetnya baru di akhir tahun 2025

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (kendala)	Rekomendasi	Timeline (Bulan/Triwulan)	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Persentase progres jika belum selesai
						Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline		
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1. Melakukan follow up ke kedepujian agar segera mengirimkan surat TL dengan mempertimbangkan kecukupan waktu yang diperlukan UPT untuk melaksanakan TL tersebut						
				2. Pemeliharaan kembali komputer alat GCMS karena masih cukup lamban untuk mengoperasikan alat, disampaikan kepada kepala balai, BMN, dan pengadaan untuk pemeliharaan komputer alat GCMS						
				3. Melakukan follow up terhadap balai penguji untuk mempercepat pelaporan dan mendokumentasikan kendala penyelesaian pengujiannya (kehabisan reagen)						
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO								
		Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian IKU mencapai 122,8% sehingga kategori tidak dapat disimpulkan	Perlu dilakukan evaluasi kembali terkait cara perhitungan realisasi capaian output, untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat menggambarkan pencapaian IKU	TW II	Dilakukan review dan pengusulan target RHPK oleh Pusat berdasarkan baseline capaian TW I	Belum dilakukan revisi/ penetapan RHPK berdasarkan review yang telah dilakukan	TW III	Capaian IKU 109,13% dengan Kategori sangat baik	50%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	Data investigasi KLB yang diberikan petugas Dinas Kesehatan tidak lengkap, sehingga	Melakukan koordinasi terkait kelengkapan laporan investigasi KLB KP	Laporan KLB telah dilengkapi oleh Dinas Kesehatan pada TW 2	Telah dilakukan koordinasi secara langsung kepada petugas dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait Laporan Investigasi KLB				100%
			Kurangnya keterlibatan BBPOM di Gorontalo dalam melakukan	Mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten/Kotabagar BBPOM di Gorontalo dilibatkan dalam tim TGC KLB KP			Advokasi ke Pemerintah Kab/Kota	Tw. IV		20%
			Proses penanganan sampel baik dari segi jumlah maupun kondisi fisik tidak sesuai dengan	Sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait persyaratan pengambilan sampel KLB yang akan dilakukan Pengujian.	Dilakukan sosialisasi pada TW 2	Telah dilakukan sosialisai kepada petugas dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait persyaratan pengambilan sampel KLB yang akan dilakukan Pengujian baik secara				100%
		Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Melakukan pengujian kembali sesuai hasil evaluasi dari kedepujian						
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder								
		Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								

No	Sasaran kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (kendala)	Rekomendasi	Timeline (Bulan/Triwulan)	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Persentase progres jika belum selesai
						Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline		
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan								
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan								
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Capaian IKU sangat baik senilai 105,26% pada triwulan 2	Mengajukan perubahan target karena melihat capaian triwulan 1 dan triwulan 2 yang sudah cukup tinggi (melebihi target tahunan) dengan prediksi akan semakin meningkat hingga akhir tahun sehingga perlu dilakukan konsultasi bersama unit pengampu (PPPOMN) dan Biro Perencanaan Keuangan.	Triwulan 2	Pengajuan perubahan target kepada Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan hasil koordinasi dari unit pengampu (PPPOMN) melalui surat Kepala BBPOM di Gorontalo nomor B-PR.04.02.23A.05.25.167 tanggal 28 Mei 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025.	Berdasarkan surat Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM nomor PR.07.21.07.25.243 tanggal 14 Juli 2025 perihal Tanggapan terhadap Penyesuaian Target Indikator Kinerja BBPOM di Gorontalo, disampaikan tindak lanjut yang perlu dilakukan sebagai berikut : 1. Melakukan penyesuaian RAPK melalui Aplikasi Simetris sesuai hasil revidu 2. Mengunggah revisi dokumen RAPK yang telah ditetapkan melalui tautan bit.ly/PK-RAPK-2025 khususnya pada folder "Revisi RAPK 2025", dan 3. Berkordinasi dengan Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian data pada movev kinerja.	Pekan terakhir Juli 2025	Perbaikan capaian berdasarkan revisi target baru disampaikan pada narasi laporan kinerja interim triwulan 2, namun perbaikan RAPK dan RHPK Simetris masih sementara berproses oleh bagian perencana Balai Besar POM di Gorontalo. Capaian hasil revisi target untuk triwulan 2 menjadi 104,93%.	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		1. Review materi KIE		Telah dilakukan review materi KIE dengan menyesuaikan karakteristik target/peserta KIE				
				2. Peningkatan jumlah sumber daya manusia, anggaran dan inovasi pelaksanaan KIE			Penambahan SDM dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan KIE	TW. IV		30%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan		1. Penyampaian melalui surat dan penjelasan langsung kepada Tim Keamanan Pangan Desa terkait kriteria kader dan komunitas		Telah dilakukan penyampaian melalui surat dan penjelasan langsung kepada Kepala Sekolah dan Tim Keamanan Pangan Sekolah terkait kriteria kader dan teknis pelaksanaan kegiatan SAPA Sekolah				
		Jumlah desa pangan aman		1. Penyampaian melalui surat dan penjelasan langsung kepada Tim Keamanan Pangan Desa terkait kriteria kader dan komunitas		Telah dilakukan penyampaian melalui surat dan penjelasan langsung kepada Kepala Desa dan Tim Keamanan Pangan Desa terkait kriteria kader dan teknis pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman				
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		Penyampaian melalui surat dan penjelasan langsung kepada Tim Keamanan Pangan Desa terkait kriteria kader dan komunitas		Telah dilakukan penyampaian melalui surat dan penjelasan langsung kepada Dinas Perindag (Bidang Perdagangan) terkait kriteria kader dan teknis pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan				

No	Sasaran kegiatan	Indikator	Kondisi Awal (kendala)	Rekomendasi	Timeline (Bulan/Triwulan)	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Persentase progres jika belum selesai
						Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline		
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Belum ada UMK yang mendapatkan sertifikat IPCPPOB, CPOTB Bertahap dan CPKB	Penambahan anggaran perjalanan dinas untuk pemetaan sarana produksi yang dapat menjangkau seluruh kabupaten kota serta untuk mengoptimalkan fasilitasi onsite (langsung ke lapangan) terutama untuk perbaikan sarana	4	Bimbingan teknis IPCPPOB, CPOTB dan CPKB	Fasilitasi pendampingan dan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi IPCPPOB,CPOTB dan CPKB	4	3 UMK telah mendapatkan sertifikat dari 9 target UMK	46,67%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum ada perkara yang tahap 1	mempercepat proses pemberkasan	4	Melakukan penindakan kejahatan obat dan makana sesuai target perkara (3 perkara) , proses pemeriksaan saksi dan ahli telah berjalan	Akan dilakukan penyerahan berkas perkara dan melakukan penindakan kejahatan obat dan makanan	4	Seluruh berkas perkara sebanyak 4 Berkas sudah P21 di TW 3	40
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	Masih dilakukan pengumpulan data untuk pembuatan laporan analisis	input data bulanan rawan kasus sebagai dasar pembuatan laporan analisis tetap dikirimkan sesuai time line	4	Input data bulanan rawan kasus sebagai dasar pembuatan laporan analisis tetap dikirimkan sesuai time line sampai bulan juni	Membuat laporan analisis di bulan Desember	4	Laporan analisis selesai di Bulan Desember 2025	50
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT								
		nilai Pembangunan ZI UPT BPOM								
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM								
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM								
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM								

3.3 Realisasi Anggaran

a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Selama periode berjalan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal senilai Rp14.526.300.000,- dengan nomor DIPA SP DIPA-063.01.2.672859/2025 Tanggal 2 Desember 2024 sebanyak delapan kali revisi. Adapun rincian revisi DIPA Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sampai dengan periode 30 Juni 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Revisi pertama pada tanggal 18 Februari 2025 berupa pemblokiran mandiri DIPA Tahun Anggaran 2025 dalam rangka perubahan Usulan Revisi Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat permintaan revisi pemblokiran mandiri dengan nomor surat B-PR.05.03.2.02.25.101 pada tanggal 14 Februari 2025.
2. Revisi kedua pada tanggal 4 Maret 2025 Revisi dalam hal Pagu Tetap dan Administrasi untuk penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi dan rencana kegiatan selanjutnya.
3. Revisi ketiga pada tanggal 12 Maret 2025 yaitu Revisi dalam hal Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025. Dilakukan pembukaan blokir sebesar Rp102.000.000,-

4. Revisi keempat pada tanggal 25 Maret 2025 Revisi dalam Usulan Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Utama Nomor B- -PR.05.03.2.03.25.171 Tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Penambahan anggaran untuk belanja barang dalam hal honor PPNPN sehingga mengubah nilai pagu menjadi Rp14.628.300.000,-
5. Revisi kelima pada tanggal 22 April 2025 Revisi halaman III DIPA yang tidak mengubah nilai PAGU.
6. Revisi keenam pada tanggal 7 Mei 2025 Revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai PAGU.
7. Revisi keenam pada tanggal 16 Juni 2025 Revisi dalam hal pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan. Revisi POK tingkat KPA yang tidak mengubah nilai PAGU.
8. Revisi kedelapan pada tanggal 24 Juni 2025 yaitu revisi pagu tetap dan revisi administrasi, pergeseran PNBPN dan pemutakhiran POK yang tidak mengubah nilai PAGU.

Tabel Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran periode Triwulan II Tahun 2025

No		Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	88,4	104,62	Rp650.662.000,00	Rp178.541.653	27,44%
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Rp38.650.000,00	Rp10.605.560	27,44%
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,3	109,13	Rp114.141.800,00	Rp31.320.510	27,44%

4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00	Rp7.189.000,00	Rp1.972.662	27,44%
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	93,6	117,00	Rp988.500,00	Rp271.244	27,44%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	94,12	101,19	Rp166.961.800,00	Rp45.814.318	27,44%
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Rp114.141.800,00	Rp31.320.510	27,44%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	96,97	121,21	Rp114.141.800,00	Rp31.320.510	27,44%
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	96,98	103,17	Rp57.070.900,00	Rp15.660.255	27,44%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	98,21	130,95	Rp28.535.450,00	Rp7.830.127	27,44%
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	97,97	111,2	Rp20.357.950,00	Rp5.586.221	27,44%

12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5	68,1	104,93	Rp2.550.247.000,00	Rp699.787.777	27,44%
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	91,02	101,34	Rp238.594.000,00	Rp65.470.194	27,44%
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	60	75	125,00	Rp423.549.000,00	Rp116.221.846	27,44%
15	Jumlah desa pangan aman	70	55	78,57	Rp446.279.000,00	Rp122.458.958	27,44%
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00	Rp521.778.000,00	Rp143.175.883	27,44%
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25	46,67	186,68	Rp33.819.000,00	Rp9.279.934	27,44%
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	11,25	28,13	Rp475.256.000,00	Rp130.410.246	27,44%
19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi	50	50	100,00	Rp116.038.000,00	Rp31.840.827	27,44%

	dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar						
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp62.387.000,00	Rp17.118.993	27,44%
21	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Rp684.500.000,00	Rp187.826.800	27,44%
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp360.500.000,00	Rp98.921.200	27,44%
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp7.220.512.000,00	Rp1.981.308.493	27,44%
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp80.000.000,00	Rp21.952.000	27,44%

b. Realisasi anggaran per sasaran Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
1	DR-3165-AEA-Koordinasi	14	6	42,86%	Rp116.038.000,00	Rp400.000	0,34%
2	DR-3165-BAH-Pelayanan Publik Lainnya	203	111	54,68%	Rp62.387.000,00	Rp3.750.000	6,01%
3	DR-3165-BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	474	302	63,71%	Rp159.382.000,00	Rp2.000.000	1,25%
4	DR-3165-BKB-Pemantauan produk	1	0	0,00%	Rp721.000.000,00	Rp32.081.804	4,38%
	DR-3165-BMB-Komunikasi Publik	20	6	30,00%	Rp79.212.000,00	Rp3.001.694	3,79%
5	DR-3165-CAB-Sarana Bidang Kesehatan	25	0	31,00%	Rp114.000.000,00	Rp0	0,00%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
6	DR-3165-CAN-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	0	36,00%	Rp80.000.000,00	Rp0	0,00%
7	DR-3165-CBV-Prasarana Bidang Kesehatan	2	0	15,00%	Rp210.000.000,00	Rp0	0,00%
8	DR-3165-PDD-Standarisasi Lembaga	1	0	22,00%	Rp1.791.719.000,00	Rp397.996.338	18,93%
9	DR-3165-QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	4	0	30,30%	Rp475.256.000,00	Rp60.260.000	9,39%
10	DR-3165-QDB-001-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7	0	75,00%	Rp423.549.000,00	Rp19.675.000	3,31%
11	DR-3165-QDB-002-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3	0	55,00%	Rp446.279.000,00	Rp18.210.000	3,54%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
12	DR-3165-QDB-003-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	0	70,00%	Rp521.778.000,00	Rp690.000	0,21%
13	DR-3165-QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	45	30	26,00%	Rp38.650.000,00	Rp1.550.000	4,01%
14	DR-3165-QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	9	0	0,00%	Rp33.819.000,00	Rp0	0,00%
15	DR-3165-QIA-001-Pengawasan dan Pengendalian Produk	308	104	41,00%	Rp247.825.000,00	Rp81.538.186	22,81%
16	DR-3165-QIA-002-Pengawasan dan Pengendalian Produk	711	314	44,16%	Rp402.837.000,00	Rp177.115.611	18,89%
17	DR-3165-QIC-001-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	26	6	23,08%	Rp44.927.000,00	Rp22.610.000	2,47%

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$h=(g/f*100)$
18	DR-3165-QIC-004Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	502	150	29,88%	Rp525.782.000,00	Rp91.605.820	14,80%
19	DR-3165-RAB-Sarana Bidang Kesehatan	12	0	0,00%	Rp811.348.000,00	Rp43.600.000	5,37%
21	WA-6384-EBA-956-Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	0,00%	Rp8.000.000,00	Rp100.000	1,25%
22	WA-6384-EBA-994- Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	0	0,00%	Rp7.314.512.000,00	Rp3.105.120.674	32,62%
TOTAL					Rp14.528.300.000,00	Rp. 4.068,356,127	27,81

c. Efisiensi Anggaran Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran Indikator.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel Efisiensi Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kriteria
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,5	88,4	104,62	Rp650.662.000,00	Rp180.949.102	27,81%	376,17902	375,18	88 %	Efisiensi
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	Rp38.650.000,00	Rp10.748.565	27,81%				
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	87,3	109,13	Rp114.141.800,00	Rp31.742.835	27,81%	392,39482	391,39	88 %	Efisiensi
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100,00	Rp7.189.000,00	Rp1.999.261	27,81%	359,58288	358,58	88 %	Efisiensi
5	Persentase Sampel PIRT Beresiko yang	80	93,6	117,00	Rp988.500,00	Rp274.902	27,81%	420,71197	419,71	88 %	Efisiensi

	ditindaklanjuti sesuai ketentuan										
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	94,12	101,19	Rp166.961.800,00	Rp46.432.077	27,81%	363,87422	362,87	88 %	Efiensi
7	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	100	111,11	Rp114.141.800,00	Rp31.742.835	27,81%	399,53654	398,54	88 %	Efiensi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	96,97	121,21	Rp114.141.800,00	Rp31.742.835	27,81%	435,85940	434,86	88 %	Efiensi
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	94	96,98	103,17	Rp57.070.900,00	Rp15.871.417	27,81%	370,98243	369,98	88 %	Efiensi

	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan										
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	98,21	130,95	Rp28.535.450,00	Rp7.935.709	27,81%	470,86180	469,86	88 %	Efiensi
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,1	97,97	111,2	Rp20.357.950,00	Rp5.661.546	27,81%	399,85617	398,86	88 %	Efiensi
12	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	64,5	68,1	105,89	Rp2.550.247.000,00	Rp709.223.691	27,81%	380,76232	379,76	88 %	Efiensi
13	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	89,82	91,02	101,34	Rp238.594.000,00	Rp66.352.991	27,81%	364,38693	363,39	88 %	Efiensi

	di wilayah kerja UPT										
14	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	60	75	125,00	Rp423.549.000,00	Rp117.788.977	27,81%	449,47860	448,48	88 %	Efiensi
15	Jumlah desa pangan aman	70	55	78,57	Rp446.279.000,00	Rp124.110.190	27,81%	282,52941	281,53	88 %	Efiensi
16	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	70	70	100,00	Rp521.778.000,00	Rp145.106.462	27,81%	359,58288	358,58	88 %	Efiensi
17	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25	46,67	186,68	Rp33.819.000,00	Rp9.405.064	27,81%	671,26933	670,27	88 %	Efiensi
18	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	40	11,25	28,13	Rp475.256.000,00	Rp132.168.694	27,81%	101,13269	100,13	88 %	Efiensi

19	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	50	50	100,00	Rp116.038.000,00	Rp32.270.168	27,81%	359,58288	358,58	88 %	Efiensi
20	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp62.387.000,00	Rp10.250.184	16,43%				
21	nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	Rp684.500.000,00	Rp112.463.350	16,43%				
22	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp360.500.000,00	Rp59.230.150	16,43%				
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp7.220.512.000,00	Rp1.186.330.122	16,43%				
24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp80.000.000,00	Rp13.144.000	16,43%				

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Balai Besar POM di Gorontalo pada Triwulan II Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta pembinaan terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Total capaian seluruh indikator perjanjian kinerja mencapai 1801,07 persen dengan rata-rata capaian 100,06 persen, sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100,06 yang dikategorikan dengan predikat “Istimewa”.

Sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang melampaui target, di antaranya persentase tindak lanjut sampel pangan olahan berisiko sebesar 87,3 persen dari target 80 persen, dengan capaian 109,13 persen; dan persentase tindak lanjut sampel sediaan farmasi berisiko sebesar 88,4 persen dari target 84,5 persen, dengan capaian 104,62 persen. Indikator pengawasan sarana produksi dan distribusi juga mencatatkan capaian tinggi, seperti pada sarana distribusi pangan olahan dengan capaian dinormalisasi 110 persen, serta sarana distribusi sediaan farmasi dengan capaian 103,17 persen.

Dalam aspek penguatan laboratorium, nilai pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium tercatat sebesar 104,93 persen, mencerminkan kemampuan teknis laboratorium dalam menyelesaikan pengujian sesuai standar. Pelaksanaan KIE juga dinilai efektif, ditunjukkan oleh capaian tingkat efektivitas sebesar 101,34 persen. Selain itu, pendampingan UMKM mencapai capaian luar biasa sebesar 186,68 persen, yang setelah dinormalisasi menjadi 110 persen, menunjukkan keberhasilan dalam pembinaan sektor produksi lokal. Indikator pembudayaan keamanan pangan di sekolah dan pasar juga menunjukkan

capaian optimal, meskipun pada indikator jumlah desa pangan aman masih perlu ditingkatkan, karena baru mencapai 78,57 persen dari target.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian rendah atau belum dapat disimpulkan. Misalnya, keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan hanya mencapai 28,13 persen dari target, dan indikator pelaporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan belum menunjukkan realisasi karena belum terdapat laporan masuk hingga akhir triwulan. Beberapa indikator lain seperti sarana produksi dan distribusi pangan olahan, meskipun capaian melebihi target, dikategorikan “tidak dapat disimpulkan” karena adanya dinamika perhitungan yang belum tuntas, terutama pada penyesuaian dengan pedoman indikator baru.

Kinerja pengawasan terhadap kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan mencatatkan capaian 100 persen, menunjukkan koordinasi yang baik antara BBPOM, Dinas Kesehatan, dan puskesmas dalam penanganan kasus. Namun, kendala juga ditemukan dalam hal kelengkapan data epidemiologis dan proses pengambilan sampel yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Sementara pada indikator PIRT berisiko, terdapat catatan koreksi dan evaluasi ulang terhadap parameter pengujian dan pengambilan keputusan yang menyebabkan capaian dikategorikan tidak dapat disimpulkan.

Kinerja pengawasan iklan dan tindak lanjut hasil rekomendasi kepada stakeholder juga menunjukkan hasil baik. Indikator pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan mencatatkan capaian sebesar 111,2 persen, dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan mencapai 101,19 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha serta lintas sektor telah berjalan dengan efektif.

Memasuki Triwulan III Tahun 2025, BBPOM di Gorontalo dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan capaian yang telah baik, sekaligus meningkatkan kinerja pada indikator-indikator yang masih menunjukkan kelemahan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah memperbaiki sistem perencanaan kegiatan berbasis risiko, agar dapat lebih adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku. Penyesuaian rencana kerja harus memperhitungkan kapasitas laboratorium, ketersediaan SDM, serta keandalan sarana pendukung.

Khusus pada indikator penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan struktural dan operasional, termasuk peningkatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan optimalisasi kapasitas penyidik di internal BBPOM. Sementara pada pelaporan KTD/ESO, perlu strategi advokasi yang lebih aktif terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk penyusunan jadwal kunjungan monitoring dan pemberian insentif pelaporan.

Penguatan laboratorium harus difokuskan pada percepatan pengadaan bahan uji dan pemeliharaan alat, mengingat adanya keterlambatan yang mempengaruhi kecepatan proses pengujian. Di sisi lain, perlu didorong percepatan pelaksanaan sampling yang terintegrasi dengan kegiatan pemeriksaan sarana untuk efisiensi waktu dan sumber daya.

Kinerja desa pangan aman yang masih di bawah target menunjukkan perlunya peningkatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui forum koordinasi lintas sektor. Langkah konkret seperti penyusunan program bersama, pelatihan kader pangan aman, serta penyebaran materi edukatif perlu menjadi agenda prioritas pada triwulan mendatang.

Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara digital perlu segera diimplementasikan. Sistem ini akan membantu dalam

pelaporan indikator secara real time, mempercepat deteksi kendala, dan memfasilitasi penyusunan tindakan korektif lebih cepat.

Untuk menjaga kualitas pengawasan secara menyeluruh, upaya peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor kunci. Pelatihan teknis, pembinaan tim lapangan, serta distribusi beban kerja yang proporsional dapat mendukung pelaksanaan tugas secara lebih merata dan efektif.

Dengan memperhatikan berbagai hasil capaian dan tantangan yang dihadapi selama Triwulan II, Balai Besar POM di Gorontalo diharapkan dapat menyusun strategi yang lebih tajam dan adaptif, guna memastikan bahwa seluruh indikator kinerja dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan pada Triwulan III Tahun 2025

Lampiran

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI GORONTALO,

{ttd}

STEPANUS SIMON SESA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

NOMOR HK.02.02.9B.09.24.126 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI GORONTALO TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	7
		Jumlah desa pangan aman	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,7

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI GORONTALO,



STEPANUS SIMON SESA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : STEPANUS SIMON SESA

Jabatan : Kepala Balai POM di Gorontalo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

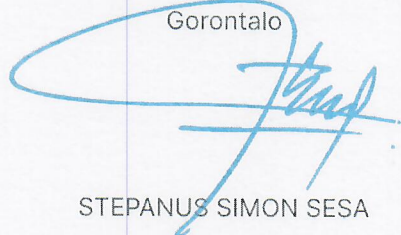
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI



TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.01 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65.1 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.82 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	3 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.97 Persentase
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.1 Persentase

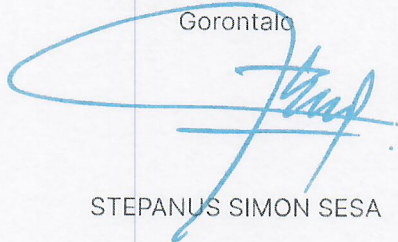
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14,526,300,000 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7,305,788,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7,220,512,000

Gorontalo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Gorontalo



STEPANUS SIMON SESA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
RI



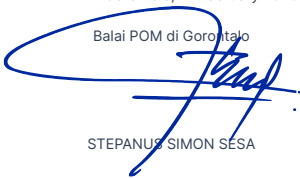
TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI GORONTALO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	650,662,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	38,650,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,189,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	988,500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	93.01	166,961,800
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	114,141,800
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	114,141,800
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	57,070,900
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	28,535,450
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	88.1	20,357,950
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	64.9	65.1	2,550,247,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	89.82	238,594,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20	20	40	40	60	60	60	75	100	100	7	423,549,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	25	25	30	45	55	70	70	85	85	100	100	3	446,279,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	20	20	50	60	70	70	100	100	100	100	1	521,778,000

TARGET															
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB pangan olahan	5	7	10	15	20	25	28	35	50	70	80	91	33,819,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	2	5	15	30	35	40	50	55	60	75	80	85	475,256,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	116,038,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	62,387,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.97	684,500,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.1	360,500,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	7,220,512,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	80,000,000
Total															14,526,300,000

Gorontalo, 12 February 2025
Balai POM di Gorontalo

STEPANUS SIMON SESA

Nomor : PR.07.21.07.25.243 Jakarta, 14 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Tanggapan terhadap Penyesuaian Target
Indikator Kinerja BBPOM di Gorontalo

Yth. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
di Gorontalo

Sehubungan dengan Surat Kepala Balai Besar POM di Gorontalo nomor B-PR.04.02.23A.05.25.167 tanggal 28 Mei 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM RI nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, RAPK merupakan lampiran dari Perjanjian Kinerja (PK). Adapun revisi perubahan target bulanan pada RAPK pada tahun berjalan dapat dilakukan dengan tetap memastikan target akhir tahun (B12) tetap sesuai dengan target pada dokumen PK.
2. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mereviu dan mempertimbangkan justifikasi usulan revisi target Bulanan pada dokumen RAPK Tahun 2025 sebagaimana terlampir:
3. Adapun tindak lanjut yang perlu segera dilakukan adalah:
 - a. Melakukan penyesuaian RAPK melalui Aplikasi Simetris sesuai hasil reviu
 - b. Mengunggah revisi dokumen RAPK yang telah ditetapkan melalui tautan bit.ly/PK-RAPK-2025 khususnya pada folder "Revisi RAPK 2025", dan
 - c. Berkoordinasi dengan Tim Kerja Monitoring dan Pelaporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka penyesuaian data pada monev kinerja.

Demikian kami sampaikan, Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

Lampiran

Surat Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Nomor : PR.07.21.07.25.243

Tanggal : 14 Juli 2025

Hasil Reviu Biro Perencanaan dan Keuangan

Indikator		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Hasil Reviu Biro Rorenkeu
Nilai Pemenuhan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Semula	0	0	64.5	64.5	64.5	64.7	64.7	64.7	64.9	64.9	64.9	65.1	Mengacu surat Sekretaris Utama no B-PR.07.2.05.25.251 tanggal 14 Mei 2025 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 poin 4c dimana Revisi perubahan target harus lebih besar/ sama dengan realisasi target bulanan dan target bulan sebelumnya. Terhadap indikator yang diusulkan diketahui bahwa realisasi pada B04 adalah 68.3 yaitu sudah lebih besar dibandingkan target akhir tahun B12. Selain itu, dan pada Desk penetapan target IKU 2025-2029
	Realisasi			68.3	68.3									

	Menjadi	0	0	0	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	65	65	65	65.1	yang dilaksanakan pada 24-25 Juni 2025, BBPOM Gorontalo tidak mengajukan kenaikan atau penyesuaian target SKL, Oleh karena itu target B4 hingga B11 agar ditetapkan sama dengan target B12 yaitu sebesar 65,1.
--	---------	---	---	---	------	------	------	------	------	----	----	----	------	---

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si